

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin secara konstitusional bagi seluruh anak di Indonesia. Komitmen negara dalam menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga, khususnya anak usia sekolah, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diposisikan tidak hanya sebagai pemenuhan hak, tetapi juga sebagai elemen fundamental dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter. Pemerintah telah menyusun serta menerapkan berbagai kebijakan sebagai pijakan strategis pembangunan sektor pendidikan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Sebagai upaya konkret dalam merealisasikan kebijakan wajib belajar, pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah menetapkan berbagai prioritas strategis dalam sektor pendidikan. Salah satunya tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Perpres ini menekankan fokus utama untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini belum mendapat hak pendidikan. Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian utama dalam peraturan ini adalah pelaksanaan program Wajib Belajar yang awalnya 12 tahun

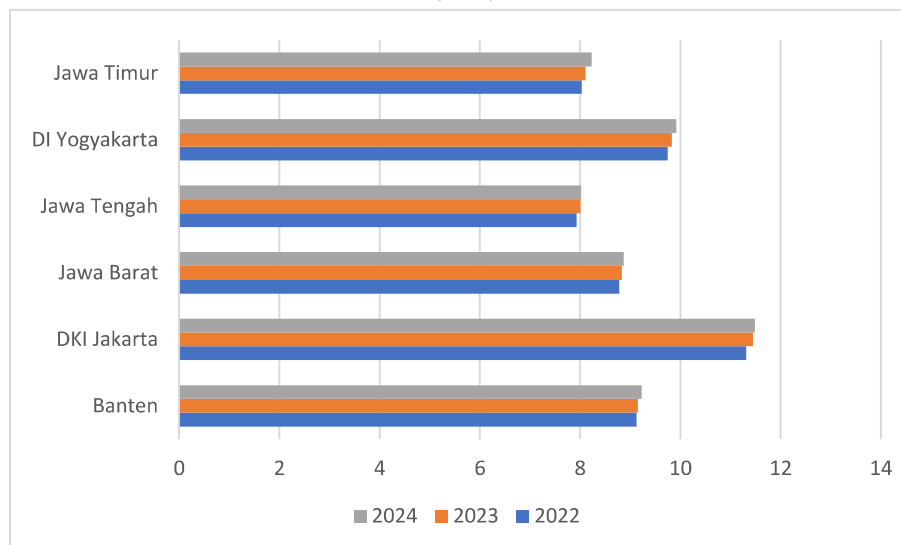
menjadi 13 Tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan di jenjang dasar dan menengah.

Dalam menjamin akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan, khususnya dalam kerangka Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun, pemerintah dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Secara struktural, masih adanya fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan manifestasi dari ketidakberhasilan sistem pendidikan dan implementasi kebijakan sosial. Kondisi ini secara langsung menghambat capaian IPM daerah dan menggagalkan kontribusi Indonesia terhadap target *Sustainable Development Goal 4 (SDG 4)*, yang berfokus pada jaminan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua. Oleh karena itu, penanganan masalah ATS memerlukan intervensi kebijakan yang strategis, terstruktur, dan berbasis data yang akurat. Penyebab ATS bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan kondisi sosial-ekonomi keluarga, minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan, serta rendahnya kesiapan dan motivasi anak untuk mengikuti proses pembelajaran (Rinaldi et al., 2021).

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat ditinjau melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang mengukur lamanya waktu penduduk mengikuti pendidikan formal. RLS dihitung berdasarkan penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada usia tersebut mayoritas individu telah menyelesaikan jenjang pendidikan. Tingginya angka anak yang tidak bersekolah secara langsung menurunkan nilai RLS, karena total tahun pendidikan yang ditempuh penduduk menjadi lebih sedikit. Kondisi ini terlihat jelas di Provinsi Jawa Tengah, di mana rata-rata lama sekolah masih berada di

bawah rata-rata nasional. Diagram berikut menggambarkan bahwa harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah relatif rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional.

Tabel 1.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Pulau Jawa 2022-2024



Sumber : <https://www.bps.go.id/id>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah (RLS) nasional mengalami peningkatan bertahap dari 8,69 tahun pada 2022 menjadi 8,77 tahun pada 2023. Namun, Provinsi Jawa Tengah masih menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, dengan RLS sebesar 7,93 tahun pada 2022, meningkat secara marginal menjadi 8,01 tahun pada 2023 dan hanya naik menjadi 8,02 tahun pada 2024. Sementara itu, beberapa provinsi lain mencatat capaian RLS yang lebih tinggi, seperti Banten (9,23 tahun pada 2024), DKI Jakarta (11,49 tahun pada 2024), Jawa Timur (8,28 tahun pada 2024), serta DI Yogyakarta (9,92 tahun pada 2024). Data tersebut memperlihatkan bahwa capaian rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah masih

berada di bawah rata-rata nasional dan tertinggal dibandingkan beberapa provinsi dengan capaian pendidikan lebih tinggi.

Hambatan pemerataan akses pendidikan juga dialami Kabupaten Blora, daerah yang secara administratif masuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan tabel RLS di eks-karisidenan Pati.

**Tabel 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2020-2024**

Kabupaten/Kota	Capaian Rata-Rata Lama Sekolah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Blora	6,83	6,99	7,01	7,08	7,26
Kabupaten Grobogan	6,91	7,11	7,26	7,28	7,29
Kabupaten Rembang	7,16	7,30	7,41	7,72	7,73
Kabupaten Pati	7,44	7,48	77,9	7,80	7,82
Kabupaten Kudus	8,75	8,76	9,06	9,34	9,35
Kabupaten Jepara	7,68	7,79	8,09	8,26	8,27

Sumber: Data BPS 2025

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Blora masih berada di bawah capaian kabupaten lain di eks-Karisidenan Pati. Pada tahun 2024, RLS Blora tercatat 7,26 tahun, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Grobogan 7,29 tahun, Kabupaten Rembang 7,73 tahun, Kabupaten Pati 7,82 tahun, Kabupaten Jepara 8,27 tahun, dan Kabupaten Kudus 9,35 tahun.

Pemanfaatan teknologi dan ketersediaan data mutakhir menjadi salah satu strategi untuk mendukung intervensi pendidikan dan pengelolaan ATS. Data ATS yang lengkap memungkinkan pemerintah daerah memahami kondisi lapangan, merancang kebijakan berbasis bukti, serta memantau implementasi

program secara lebih terstruktur. Sehingga layanan publik yang berkualitas akan berperan penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah (Robinson, 2013).

Penerapan *e-government* berupaya untuk membangun interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat melalui platform daring (Rachmatullah & Purwani, 2022). Teknologi ini membuat layanan publik menjadi lebih efisien, efektif, dan berkualitas (Farida & Lestari, 2021), sekaligus berpeluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan program pendidikan (Russo et al., 2014). Penggunaan teknologi juga mempermudah proses administrasi dan pengelolaan data, sehingga transparansi layanan publik meningkat dan akses pendidikan dapat diperluas (Rachman & Noviyanto, 2017).

Beragam regulasi disusun untuk memastikan digitalisasi layanan publik di Indonesia dapat berjalan secara optimal dalam mendukung reformasi birokrasi dan mendorong inovasi pelayanan. Melalui penerapan *e-government*, diharapkan kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat meningkat, efisiensi internal pemerintahan bertambah, serta akses publik terhadap informasi pemerintah menjadi lebih mudah.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penerapan inovasi layanan publik berbasis digital. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri demi kepentingan masyarakat.

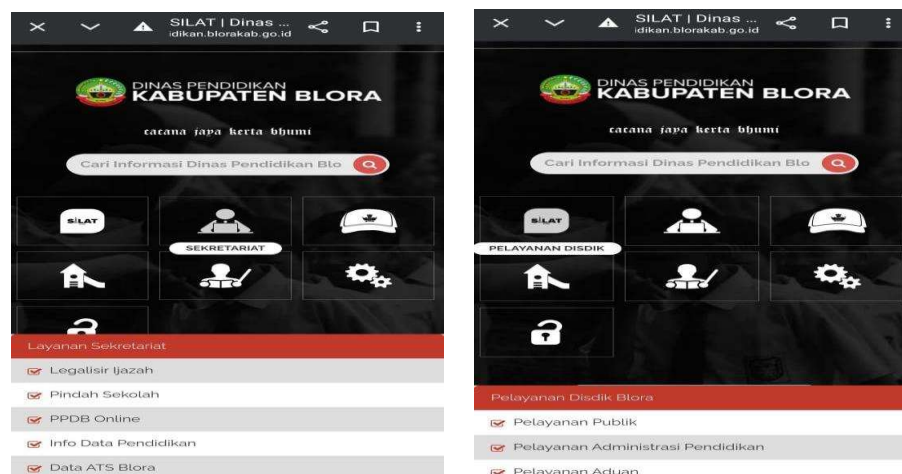
Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah memberikan ruang untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintahan dan mendukung prinsip *good governance* (Sukmadi, 2021), tetapi juga dapat mendorong pemerataan pendidikan. Dalam konteks organisasi publik, inovasi dipahami sebagai pengembangan produk, sistem, atau prosedur baru yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat (Lawson & Samson, 2001; Osborn & Brown, 2013). Pemanfaatan teknologi dalam inovasi layanan publik memungkinkan pemerintah daerah memperluas akses pendidikan, mempermudah pendataan anak usia sekolah, mempercepat intervensi bagi Anak Tidak Sekolah (ATS), serta meningkatkan kualitas dan pengelolaan layanan pendidikan di seluruh wilayah.

Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah yang berkomitmen untuk mengembangkan inovasi layanan publik berbasis digital. Upaya ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123). Landasan operasional implementasi inovasi juga tercantum dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berbasis data.

Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam memberikan akses pemerataan pendidikan adalah dengan melaunching aplikasi Sistem Informasi

Anak Tidak Sekolah (SILAT). Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk mempermudah pendataan anak yang tidak bersekolah, memungkinkan pemerintah daerah melakukan intervensi secara cepat dan terarah, serta menyediakan data secara *real-time* bagi para pemangku kebijakan. Inovasi ini menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan informasi ATS, sehingga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemerataan pendidikan di Kabupaten Blora.

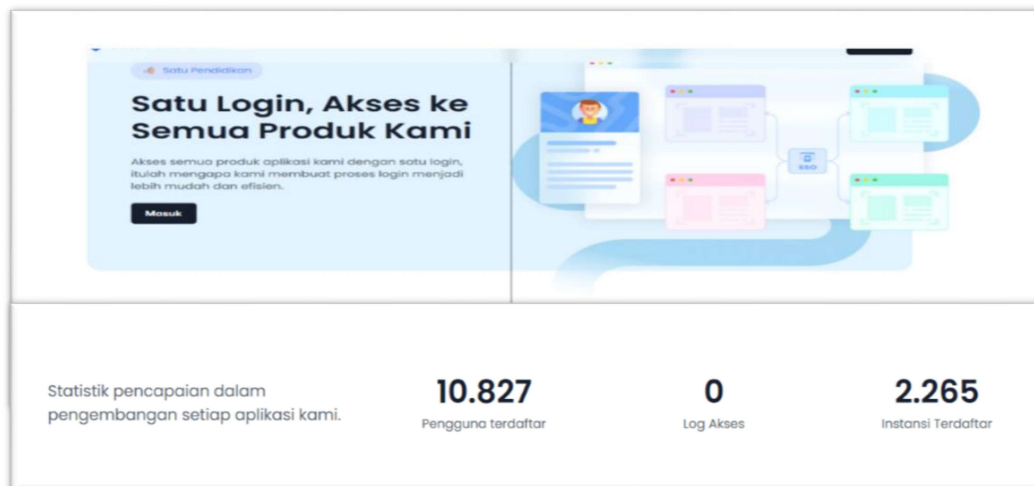
Sebelum penerapan inovasi SILAT, pemerintah Kabupaten Blora menghadapi keterbatasan akses terhadap data yang akurat dan terintegrasi mengenai anak-anak yang belum terdaftar di lembaga pendidikan formal. Dinas Pendidikan hanya mengandalkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Pusdatin Kemendikbudristek, yang mencatat peserta didik terdaftar di sekolah formal. Akibatnya, pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak menyeluruh, koordinasi antarinstansi terbatas, dan proses intervensi berjalan lambat. Berikut tampilan beranda aplikasi SILAT.



Gambar 1.1 Beranda Aplikasi SILAT
Sumber : dinaspendidikan.blorakab.go.id

Gambar 1.2 menampilkan beranda utama aplikasi SILAT. Aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah) dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan data terkait Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora. Fitur lain yang tersedia dalam SILAT mencakup integrasi layanan administrasi pendidikan, seperti legalisasi ijazah, proses pindah sekolah, pendaftaran peserta didik baru (PPDB) secara online, serta akses informasi terkait statistik pendidikan di Kabupaten Blora. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan data ATS dan administrasi pendidikan dalam satu platform, mempermudah koordinasi antar lembaga, serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

Sistem SILAT juga menyimpan catatan lokasi sebaran ATS yang dapat digunakan untuk merancang intervensi pendidikan, termasuk identifikasi wilayah dengan konsentrasi ATS tinggi dan pemantauan efektivitas program. Dengan fitur-fitur tersebut, aplikasi menyediakan kerangka kerja digital untuk pengelolaan data anak usia sekolah, sekaligus memungkinkan akses informasi yang lebih terstruktur bagi pemerintah daerah. Meskipun telah menyediakan akses data secara *real-time*, penerapan inovasi SILAT masih menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. Kondisi ini dapat dilihat dari capaian statistik akses publik pada SILAT yang cenderung masih rendah. Seperti pada gambar berikut:

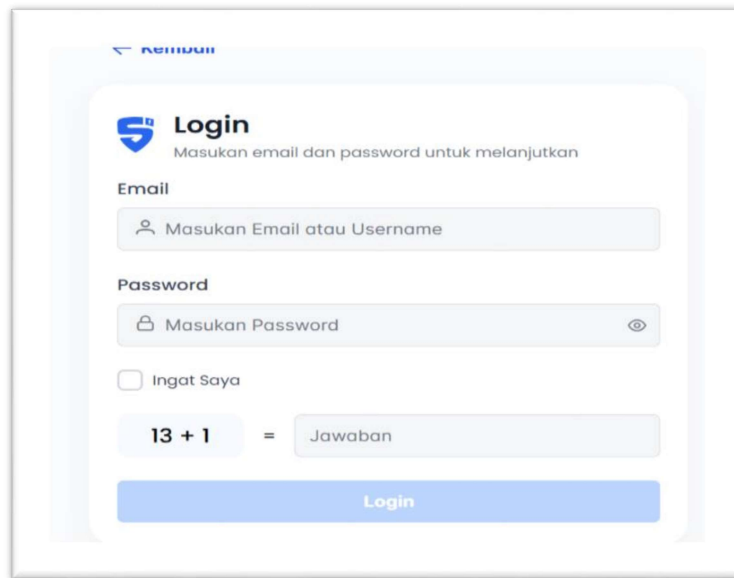


Gambar 1.2 Statistik Pengguna Aplikasi SILAT

Sumber: <https://ats.blorakab.go.id/>

Pada gambar 1.1 dapat dilihat pencapaian statistik dalam pengembangan aplikasi SILAT memiliki sekitar 10.827 pengguna terdaftar dan 2.265 instansi terdaftar akan tetapi informasi log akses masih 0. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas login atau penggunaan aktif aplikasi masih sangat minim. Rendahnya interaksi pengguna dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait, kurangnya pelatihan dalam pengoperasian aplikasi, atau belum meratanya pemahaman mengenai manfaat SILAT sebagai alat bantu perencanaan pendidikan. Dengan demikian, meskipun SILAT memiliki potensi besar dalam mendukung pengendalian ATS, optimalisasi pemanfaatannya masih memerlukan penguatan strategi implementasi serta peningkatan kapasitas pengguna.

Untuk memperoleh akses terhadap data serta melakukan input ATS secara lebih rinci, pengguna diwajibkan melalui proses autentikasi. Pada tahap tersebut, sistem mengarahkan pengguna ke menu *log-in* yang ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 1.3 Tampilan Log In Aplikasi SILAT

Sumber: <https://ats.blorakab.go.id/>

Gambar 1.2 menunjukkan tampilan autentikasi pengguna pada aplikasi SILAT. Akses masuk tersebut dibatasi bagi operator desa, pendidik pada satuan pendidikan, serta tenaga teknis pendata Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tergabung dalam tim Serdadu Data. Pembatasan akses ini diterapkan untuk menjaga keamanan sistem dan validitas data, sehingga masyarakat umum tidak diberikan hak akses penuh ke dalam aplikasi.

Kondisi tersebut menjadikan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kewenangan login SILAT sebagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Setiap pengguna yang terlibat dituntut mampu mengoperasikan aplikasi, melakukan input data, serta menjalankan proses pemutakhiran

informasi secara tepat agar alur kerja sistem tidak terhambat. Keterbatasan kemampuan pengguna berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan data ATS, termasuk pada tahap pencatatan, verifikasi, dan koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi bagi kelompok pengguna yang berwenang menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran implementasi inovasi SILAT di Kabupaten Blora.

Ketersediaan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Blora masih menjadi tantangan dalam proses implementasi inovasi SILAT. Berdasarkan laporan Kabid TI Dinkominfo Kabupaten Blora, Ahmad Hudil Khoiri, sekitar 28 desa di beberapa kecamatan masih belum memiliki akses internet, menurut pendataan tahun 2023 atas permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Radar Bojonegoro, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan inovasi digital di wilayah Kabupaten Blora.

Penelitian sebelumnya yang berjudul *“Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung”* menyatakan bahwa Kabupaten Sijunjung telah menerapkan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika. Meski demikian, indeks SPBE yang dicapai justru masih tergolong rendah. Rendahnya indeks ini dipengaruhi oleh terbatasnya koordinasi antar instansi serta kurang memadainya infrastruktur jaringan di daerah tersebut. Hasil temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi memegang peran strategis dalam keberhasilan pelaksanaan inovasi digital (Febrian Arga Wahyudi, Nora Eka Putri, 2024; Maulani et al., 2021).

Penelitian lain menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan layanan digital tidak hanya terkait dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup sikap, motivasi, serta keterbukaan terhadap perubahan. Hal ini sejalan dengan konsep *digital readiness*, yang menekankan pentingnya aspek kognitif, afektif, dan perilaku dalam menerima serta menerapkan inovasi teknologi baru (Mappasiara, 2018; Rumahorbo, 2022). Oleh karena itu, implementasi inovasi SILAT di Kabupaten Blora perlu memperhatikan kesiapan operator dan staf secara menyeluruh, baik dari sisi kemampuan teknis maupun sikap dan motivasi. Penilaian ini menjadi langkah krusial agar penerapan sistem berjalan lancar, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk memahami mekanisme implementasi inovasi SILAT, khususnya bagaimana dukungan yang tersedia di lingkungan pemerintahan memengaruhi kontribusi aplikasi, kapasitas anggaran, kesiapan operator, dan infrastruktur dalam pelaksanaannya. Selain itu, perlu diperhatikan pula nilai atau manfaat yang diterima masyarakat sebagai penerima layanan publik SILAT, terutama dalam upaya pemerataan akses pendidikan dan mendukung pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: “Bagaimana implementasi inovasi aplikasi SILAT dalam mendukung pengentasan ATS di Kabupaten Blora?”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang menjadi fokus penelitian terkait implementasi inovasi aplikasi SILAT dalam pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora:

1. Dukungan politik dan kebijakan dari Pemkab Blora melalui Dinas Pendidikan serta pejabat publik di Kabupaten Blora masih belum optimal dan konsisten dalam mendukung implementasi SILAT. Kondisi ini menyebabkan sosialisasi inovasi kepada birokrasi dan masyarakat tidak merata, sehingga partisipasi dan keterlibatan dalam mendukung pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih terbatas.
2. Pemerintah Kabupaten Blora belum sepenuhnya mampu menyediakan kapasitas yang memadai untuk mendukung penerapan inovasi SILAT. Keterbatasan ini mencakup anggaran, infrastruktur teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia, sehingga operator SILAT menghadapi kesulitan dalam menjalankan program, memantau, dan menindaklanjuti kasus ATS secara efektif.
3. Implementasi inovasi SILAT dalam proses identifikasi, pendaftaran, dan penjangkauan ATS masih belum optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan akurasi data, lambatnya pemrosesan informasi, dan rendahnya respons tindak lanjut, sehingga pemanfaatan SILAT dalam mendukung program pengentasan ATS belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.
4. Operator pelaksana SILAT masih sangat bergantung pada beberapa individu terlatih (*high performer*), sehingga ketidakhadiran mereka dapat

menyebabkan alur kerja terhambat, prosedur menjadi tidak efisien, dan frekuensi permintaan bantuan dalam mengakses inovasi SILAT dapat meningkat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses implementasi inovasi Sistem Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu (SILAT) di Kabupaten Blora dalam menunjang pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS)?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi inovasi SILAT dalam menunjang pengentasan ATS di Kabupaten Blora?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses implementasi inovasi Sistem Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu (SILAT) di Kabupaten Blora dalam menunjang pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS).
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SILAT dalam menunjang pengentasan ATS di Kabupaten Blora.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait pelayanan publik, administrasi publik, dan inovasi dalam pelayanan administrasi pendidikan. Dengan mengkaji implementasi SILAT, penelitian ini bertujuan memperkaya literatur mengenai penerapan inovasi dalam sektor pendidikan, serta memberikan wawasan baru tentang peningkatan akses pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait implementasi inovasi dalam administrasi publik.

2. Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam meningkatkan implementasi Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT), sehingga dapat lebih efektif dalam menunjang pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan mempercepat akses pendidikan bagi anak-anak yang kesulitan bersekolah.
- b) Dengan sistem yang terintegrasi, lembaga pendidikan dapat lebih mudah berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial, untuk menunjang pengentasan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) dan mempercepat solusi yang diperlukan.

- c) Dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, serta memotivasi mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program pendidikan, terutama dalam memanfaatkan layanan SILAT agar anak-anak bisa bersekolah kembali.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian, menyesuaikan sistem yang sudah pernah dibuat dengan karakteristik objek yang menjadi permasalahan pada penelitian ini dan mencermati metodologi penelitian apa yang cocok untuk menelaah upaya pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada pada tulisan ini.

1.6.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bella puspa dewi, dkk (2020)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep dari Harvard JFK School of Government, yang menyatakan bahwa untuk menerapkan pelayanan publik berbasis digital, ada tiga elemen kunci yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan serius, yaitu Support, Capacity, dan Value.	Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda telah didukung oleh kebijakan yang jelas dan dipahami pegawai. Namun, keterbatasan sosialisasi dari Pemerintah Kota menghambat penyuluhan kepada masyarakat. Fungsi website masih terbatas, mengurangi interaksi dan penyebaran informasi secara online. Meskipun demikian, e-government membantu menghemat biaya, waktu, dan tenaga, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sambutan.

2	Rini otavianti, dkk (2024)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pelayanan publik berbasis E-Government dan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam pelayanan melalui aplikasi e-Pusluh di Bidang Penyuluhan Kota Palu.	Teori yang digunakan dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep pelayanan publik berbasis digital, terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh yaitu <i>Support</i> , <i>Capacity</i> , dan <i>Value</i>	Dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government melalui aplikasi e-Pusluh di Bidang Penyuluhan Kota Palu didukung oleh regulasi dan sosialisasi yang ada. Infrastruktur teknologi dan SDM yang kompeten cukup memadai. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi penyuluh dalam pelaporan, menghemat waktu dan biaya. Namun, faktor penghambat utama adalah kurangnya sosialisasi yang menyebabkan aplikasi belum sepenuhnya dimanfaatkan.
3	Fitriana Dewi Nur Laila1 dan Muhammad Mujtaba Habibi, 2024)	Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi inovasi layanan digital desa <i>Sabdopalon</i> dalam mewujudkan <i>e-government</i> serta hambatan dalam penerapannya.	Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori elemen keberhasilan <i>e-government</i> menurut Harvard JFK School of Government, yaitu <i>Support</i> , <i>Capacity</i> , dan <i>Value</i> .	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui <i>Sabdopalon</i> belum optimal. Meskipun dukungan hukum dan anggaran mencukupi, infrastruktur dan sosialisasi masih terbatas. <i>SDM</i> juga kurang terampil dalam IT, dan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui layanan ini. Hambatan lainnya adalah jaringan internet yang belum merata. Pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi, memperbaiki infrastruktur, dan meratakan jaringan internet agar <i>Sabdopalon</i> dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
4	(Sopyan Manshuri dan Tjitjik Rahayu,2023)	Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi inovasi berbasis aplikasi	Penelitian ini menggunakan empat indikator implementasi oleh Edward III yaitu komunikasi, sumber daya,	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan implementasi program berjalan dengan baik sesuai dengan indikator implementasi. Diantaranya

		Klampid New Generation di Kelurahan Wonokromo.	disposisi, dan struktur organisasi.		komunikasi berjalan dengan baik, sumber daya yang memadai, dan struktur birokrasi yang bijaksana. Namun pada indikator disposisi yaitu variabel intensif, belum diterapkan dengan baik oleh pemerintah
5	(P, Resky Amalia, dkk, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan inovasi kebijakan jika dilihat dari teori inovasi implementasi yang dikemukakan oleh Toddy Steellman yaitu dari segi faktor individu yang terdiri dari Motivasi, Norma-Norma, dan Kesesuaian.	Penelitian ini menggunakan teori inovasi implementasi yang dikemukakan oleh Toddy Steellman yaitu dari segi faktor individu yang terdiri dari Motivasi, Norma-Norma, dan Kesesuaian.	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada UPK kecamatan Tanasitolo	Penelitian tentang inovasi kebijakan SPP menunjukkan bahwa peningkatan pelunasan tunggakan terkait motivasi individu, minat masyarakat terkait norma-norma, namun ada ketidaksesuaian karena beberapa keluarga meninggalkan daerah tanpa sepengetahuan pemerintah dan UPK.
6	(Paototngi, Aswik., Dkk. 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program inovasi pelayanan kesehatan berbasis Gemari di Kabupaten Kolaka.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori inovasi sektor publik yang dikemukakan oleh De Vries, Bekkers and Tummers dengan empat tipe inovasi sektor publik yaitu; inovasi proses, inovasi produk atau pelayanan, inovasi tata kelola, dan inovasi konseptual.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik <i>purposive sampling</i>	Program inovasi pelayanan kesehatan berbasis gerakan masyarakat mandiri di Kabupaten Kolaka belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik oleh karena produk layanan inovasi kesehatan tersebut belum dapat diakses secara online maupun melalui aplikasi khusus, namun dari indikator implementasi yang digunakan yaitu interpretasi, organisasi dan aplikasi sudah berjalan dengan baik
7	(Fadilah, Gayuh Nur dan	Penelitian berfokus pada Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi 6 In 1 dalam Pelayanan Administrasi	Teori atribut Inovasi Rogers	Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan 6 in 1 (e-Lampid) memiliki 1) keuntungan relatif, 2) kesesuaian, 3)

	Maesaroh,., 2020)	Kependudukan di Kota Surabaya			kemungkinan dicoba dan 4) kemudahan diamati, akan tetapi masih mengalami kerumitan. Dalam pelaksanaannya, Inovasi pelayanan 6 in 1 (eLampid) memiliki faktor pendukung, yaitu adanya orang- orang dan kelompok kreatif, budaya, dan sumber daya manusia. Disisi lain, faktor penghambat juga terdapat dalam pelaksanaan inovasi pelayanan 6 in 1 (e-Lampid) yaitu ketergantungan terhadap figur yang memiliki high performer serta tekanan dan hambatan administratif.
8	(Dewi Silviana, dkk, 2024)	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PIPPK, hambatan dan upaya yang dilakukan di kecamatan Arcamanik	Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijaksanaan dari T Thomas B. Smith yaitu landasan hukum, organisasi yang menjalankan, kelompok yang di targetkan, faktor- faktor lingkungan	Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif	Pelaksanaan program PIPPK menghadapi hambatan dalam pemahaman hukum, kordinasi organisasi, identifikasi kelompok sasaran, serta tantangan lingkungan.
9	(Melinda et al., 2020)	Pada penelitian ini membahas tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.	Penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M. Rogers yang menyatakan bahwa terdapat lima atribut inovasi yang dapat menentukan penerimaan inovasi yaitu relative advantages, compatibility, complexity, trainability, dan observability.	Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi sedangkan teknik pemilihan informan melalui teknik purposive sampling.	Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi sedangkan teknik pemilihan informan melalui teknik purposive sampling.
10	(Muhammad Fahmi Azahri, dkk, 2022)	Menganalisis penggunaan Aplikasi SI D'nOK Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Mewujudkan Good Governance	Teori <i>Good Governance</i> yang dikemukakan oleh UNDP	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Serta data didapatkan melalui wawancara,	Hasil penelitian menunjukkan penggunaan aplikasi SI D'nOK belum mewujudkan prinsip good governance yang dibuktikan dengan buruknya ke berjalanan aplikasi ketika masyarakat

					observasi, dan dokumentasi yang di analisis oleh peneliti.	menggunakannya. Hal ini dibuktikan dengan ulasan masyarakat yang rendah di Google Play Store dan pendapat yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
11	(Ratnasari, Lisa.,dkk, 2021)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif aplikasi Monggo Lapor sebagai implementasi E-Government dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan dalam melayani masyarakat	Teori Good Governance digunakan sebagai telaah antara beberapa indikator pelayanan publik seperti : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.	Metode penelitian yang lakukan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.		Dengan diberlakukannya pelayanan publik melalui aplikasi sebagai implementasi dari E-Government akan dapat menciptakan pemerintahan yang efisien dan saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat
12	(Faizal dkk., 2020)	Penelitian mengenai digitalisasi pelayanan pensiun di PT Taspen (Persero) melalui aplikasi Taspen Otentikasi.	Teori yang digunakan adalah teori <i>e-government</i>	Metode penelitian yang lakukan adalah deskriptif kualitatif		Hasil penelitian menunjukkan pelayanan pensiun yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) KCU Kota Bandar Lampung setelah adanya taspen otentikasi secara digital belum maksimal, kurangnya informasi secara terbuka kepada masyarakat sehingga masih banyak yang belum mengetahui tentang efektivitas, efisiensi dan responsivitas pelayanan pembayaran pensiun PNS di PT. Taspen (Persero).
13	(Zulfia, dkk, 2023)	Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan inovasi yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai/aparat di berbagai level dalam pemerintahan, demi	Menggunakan teori tiga tahap perilaku inovatif yang dapat mendukung kinerja yaitu memunculkan ide atau gagasan, ide promosi dan ide realisasi (Technology & Organizations, 2020)	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif		Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan inovasi daerah sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal komitmen dari berbagai pihak, termasuk Walikota, Sekda, dan pimpinan OPD, untuk mendukung kelancaran

		mewujudkan pemerintahan yang cerdas dan efisien.			dan keberhasilan inovasi yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi
14	(Anwar dan Diah Ayu Safitri, 2024)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi inovasi dalam pelayanan publik De'Best Wayan Sadar Diri (Dengan Ekosistem Bali untuk Pengawasan dan Pelayanan Berbasis Data RiiL).	Teori menurut Chen et al., (2020) inovasi pelayanan publik menekankan tiga unsur penting yaitu : kebaruan (<i>novelty</i>), pengembangan dan implementasi (<i>development and implementation</i>), dan ekosistem (<i>ecosystem</i>)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa inovasi De'Best Wayan Sadar Diri diimplementasikan secara sistematis dari awal hingga akhir, dengan menggunakan 10 alat. Strategi untuk menjaga kelangsungan inovasi ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rutin, serta dengan mengoptimalkan kolaborasi yang terintegrasi antara instansi terkait dan berbagai kelompok masyarakat perikanan.
15	(Soeratin, Setiawan Boyke, 2024)	<i>The purpose of this study is to analyze the application of innovation management strategies for company competitiveness in the e-commerce industry.</i>	<i>The theory uses 5 types of innovation according to Suatama, (2013) : Product and service innovation strategy, Process innovation strategy, Marketing Innovation Strategy, Organizational innovation strategy and Business model innovation strategy.</i>	<i>This research uses qualitative research methods. The data collection technique in this research uses the literature study method.</i>	<i>The findings indicate that an effective innovation management strategy can support organizations in staying competitive in a growing market by expanding market share through new customers, improving customer satisfaction, and boosting company productivity and efficiency. Companies that fail to implement innovation strategies will face disadvantages, making it more challenging for them to compete and thrive in an increasingly competitive environment.</i>
16	(Frizni, Dinda., dkk 2024)	<i>The purpose of this study is to determine how effectively the Access innovation by KAI is being used, as well as the obstacles faced in its implementation.</i>	<i>The theory used in this study is the concept of innovation, according to Gopalakrishnan and Damanpur, innovation basically refers to something new, whether in the form of ideas, products, methods, or</i>	<i>Method This type of research is qualitative, and the method is descriptive.</i>	<i>The research findings show that this KAI access innovation has been quite helpful to passengers with some additional features, and this innovation has changed the service significantly. However, there are still</i>

			<i>new forms of service (Curtis, 2019).</i>		<i>problems with unclear seat information and applications.</i>
17	(Rostika, dkk., 2024)	<i>The purpose of this research is to evaluate the extent to which the Malang Mbois app can meet expectations in improving public service efficiency and to identify the factors contributing to its success and the obstacles encountered in its implementation.</i>	<i>Diffusion of innovations theory served as the theoretical foundation to assess the five main characteristics of innovation: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability.</i>	<i>A qualitative research method was employed, with data obtained from interviews with service users, city government stakeholders, and an analysis of the digital footprint of the app in daily operations.</i>	<i>The findings indicate that the Malang Mbois app has successfully increased the effectiveness of public services, with 80% of users reporting enhanced satisfaction due to greater efficiency and transparency in services.</i>
18	(Sufi, Wasiah, 2023)	<i>The purpose of this study is to determine the success and failure of the application of public service innovation in the perspective of dynamic governance in PekanbaruCity, which conducts a study at the Population and Civil Registration Office.</i>	<i>This research uses the theory of Service Innovation according to Rogers and the theory of dynamic governance according to Boon and Geraldine.</i>	<i>This research uses qualitative research methods with case study methods. Researchers use case studies with intrinsic types.</i>	<i>The results obtained from this study are the successes and failures found in each instrument of service innovation in the perspective of dynamic governance.</i>

Sumber : diolah oleh penulis 2025

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap delapan belas penelitian terdahulu yang disarikan pada Tabel 1.3, dapat diidentifikasi beberapa persamaan dan perbedaan metodologis maupun temuan substantif yang menjadi landasan justifikasi kebaruan (*novelty*) studi ini.

Penelitian sebelumnya menunjukkan fokus utama pada implementasi inovasi layanan publik berbasis *e-Government*, terbagi dalam beberapa kerangka teoretis. Mayoritas penelitian seperti yang dilakukan Bella Puspa Dewi, dkk., 2020; Rini Otavianti, dkk., 2024; Fitriana Dewi Nur Laila dan Muhammad Mujtaba Habibi, 2024 konsisten menggunakan kerangka keberhasilan Harvard JFK School of Government (*Support, Capacity, Value*). Studi lain menggunakan pendekatan implementasi kebijakan seperti Edward III (Sopyan Manshuri dan Tjitjik Rahayu, 2023) dan teori inovasi seperti Toddy Steellman (P. Resky Amalia, dkk., 2021). Kesamaan dan perbedaan ini menegaskan relevansi berbagai kerangka dalam konteks layanan digital di Indonesia.

Temuan studi terdahulu memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi tantangan implementasi inovasi. Hambatan yang paling sering teridentifikasi melibatkan aspek sosialisasi yang belum optimal dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi. Studi oleh Bella Puspa Dewi, dkk. (2020) dan Rini Otavianti, dkk. (2024) sama-sama menyoroti kurangnya sosialisasi sebagai faktor penghambat utama. Keterbatasan pada faktor disposisi (variabel insentif) juga ditemukan dalam penelitian implementasi program Klampid New Generation (Sopyan Manshuri dan Tjitjik Rahayu, 2023).

Celah penelitian (*research gap*) menjadi dasar penegasan kebaruan (*novelty*) dari studi ini. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada inovasi layanan umum, misalnya milik Muhammad Fahmi Azahri, dkk., 2022 yang membahas administrasi

kependudukan dan penelitalain lainnya. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menguji implementasi inovasi *e-Government* (SILAT) dalam sektor administrasi pendidikan yang dihubungkan langsung dengan penyelesaian isu sosial strategis daerah, yaitu pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora. Studi terdahulu cenderung mengakhiri analisis pada identifikasi faktor proses; penelitian ini bertujuan mengisi celah dengan menguji implementasi SILAT hingga tingkat capaian kinerja *outcome* kebijakan ATS. Analisis dilakukan mengenai bagaimana disparitas kinerja layanan SILAT (khususnya pada variabel responsivitas layanan) secara langsung menghambat percepatan pencapaian target *zero* ATS. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian kerangka *e-Government* Harvard JFK School of Government untuk menguji efektivitas implementasi inovasi layanan pendidikan (SILAT) dalam konteks pengentasan ATS di Kabupaten Blora. Analisis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan rekomendasi spesifik untuk menutup *gap* kinerja layanan yang menghambat pencapaian target *outcome* kebijakan publik.

1.6.2 Deskripsi Teori dan Konsep

1.6.2.1 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu bidang kajian yang bersifat multidimensional, yang mencakup aspek nilai, manajerial, dan struktural dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dwight Waldo (dalam Mufiz, 2016) memaknai administrasi publik sebagai suatu bentuk organisasi dan pengelolaan manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan pemerintahan. Ia menekankan bahwa administrasi publik adalah perpaduan antara seni dan ilmu dalam pengelolaan negara, yang sarat dengan nilai-nilai moral dan etika publik.

Ibrahim Amin (2017:30), dalam perspektif yang lebih operasional, mendefinisikan administrasi publik sebagai keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Penyelenggaraan tersebut dilakukan melalui mekanisme kerja yang terstruktur dan didukung oleh sumber daya manusia serta sistem administrasi yang memadai. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam proses manajerial pemerintahan.

Sementara itu, Nicholas Henry (1988:73) mengidentifikasi tiga unsur utama dalam administrasi publik, yaitu organisasi publik, manajemen publik, dan implementasi kebijakan. Ia menekankan bahwa administrasi publik merupakan sebuah sistem kompleks yang terdiri atas elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mewujudkan kebijakan publik secara nyata.

Dengan mensintesis ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses pengelolaan pemerintahan yang mengintegrasikan nilai-nilai normatif, pendekatan manajerial, dan struktur kelembagaan guna mencapai kepentingan publik secara efektif dan efisien. Evaluasi kritis terhadap ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa pemahaman komprehensif mengenai administrasi publik memerlukan keseimbangan antara orientasi moral, pendekatan teknokratis, dan kerangka institusional.

Penerapan inovasi digital melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Terpadu (SILAT) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora merupakan contoh nyata praktik administrasi publik modern. Inisiatif ini

menunjukkan upaya pengelolaan inovasi publik yang tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi pendidikan. Dengan demikian, SILAT mencerminkan penerapan prinsip administrasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.6.2.2 Manajemen Publik

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Menurut J. Steven Ott, Albert Hyde, dan Jay M. Shafritz (dalam Pasolong, 2019:83) menekankan bahwa komponen utama dari ruang lingkup administrasi publik yaitu manajemen publik dan kebijakan publik yang saling terkait secara bersamaan. Selain itu manajemen publik menurut Shafritz dan Russel (Keban, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Berbagai pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen publik adalah upaya dalam merancang, mempersiapkan dan menjalankan baik itu barang dan jasa kepada masyarakat dan pada akhirnya dilakukan evaluasi dan penilaian atas kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian implementasi inovasi aplikasi SILAT manajemen publik memiliki peran dalam perencanaan sampai dengan berjalannya dan terlaksananya inovasi aplikasi

SILAT sehingga masyarakat dapat menikmati inovasi dengan mudah dan efektif.

1.6.2.3 Pelayanan Publik

Manajemen publik merupakan cabang ilmu dari administrasi publik yang berfokus pada tata kelola organisasi publik dapat bekerja secara efisien, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Nor Ghofur (2014) mendefinisikan manajemen publik sebagai bentuk manajemen pemerintahan, yang mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini menitikberatkan pada aspek fungsional dari kegiatan pemerintahan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik secara sistematis.

Selanjutnya, J. Steven Ott, Albert Hyde, dan Jay M. Shafritz (dalam Pasolong, 2019:83) menegaskan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua komponen utama dalam ruang lingkup administrasi publik yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya berkontribusi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, di mana kebijakan publik merumuskan arah, dan manajemen publik mengelola implementasinya.

Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) menambahkan dimensi tanggung jawab individual dalam pengelolaan organisasi publik, di mana manajemen publik diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh individu untuk mengelola sumber daya—baik manusia maupun material—dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen publik sangat

dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan dan strategi pengelolaan yang dijalankan oleh pelaku birokrasi.

Dengan menggabungkan dan membandingkan pandangan para ahli tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa manajemen publik adalah proses terencana dan bertanggung jawab dalam merancang, mengorganisir, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pelayanan publik, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Penelaahan secara kritis mengindikasikan bahwa efektivitas manajemen publik sangat bergantung pada sinergi antara perencanaan strategis, kapasitas organisasi, serta orientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks implementasi inovasi aplikasi SILAT di Kabupaten Blora, manajemen publik memiliki peranan sentral mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, hingga pelaksanaan layanan berbasis digital tersebut. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan administrasi pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan aplikasi SILAT tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, melainkan juga oleh efektivitas manajemen publik dalam mengelola proses inovasi tersebut secara menyeluruh.

1.6.2.4 Inovasi Pelayanan Publik

Wes & Far (Ancok 2012:23) Inovasi dalam pelayanan publik merupakan suatu pendekatan strategis yang mengedepankan pembaruan dan penciptaan cara-cara baru dalam meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Menurut Wes dan Far (dalam Ancok, 2012:23), inovasi

merujuk pada upaya yang disengaja dalam mengenalkan dan menerapkan gagasan, proses, produk, atau prosedur yang baru pada suatu unit tertentu, dengan tujuan memberikan manfaat bagi individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Inovasi dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan tindakan berpikir kreatif manusia dalam menciptakan hal-hal baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta berpotensi memperbaiki kualitas hidup.

Senada dengan itu, Everett M. Rogers (2003:12) mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, produk, atau metode yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau kelompok tertentu. Albury (2003) juga menggarisbawahi bahwa inovasi adalah "ide-ide baru yang berfungsi" (new ideas that work), menekankan bahwa kebaruan sebuah inovasi harus memiliki implikasi manfaat yang nyata dalam praktik. Oleh karena itu, inovasi tidak cukup hanya bersifat baru secara bentuk, namun harus mampu memberikan nilai tambah atau solusi terhadap permasalahan yang ada.

Dalam konteks manajemen sektor publik, inovasi diartikan sebagai penerapan strategi, metode, dan mekanisme baru dalam penyusunan kebijakan maupun prosedur operasional yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan publik secara efektif. Bertucci dan Alberti (2006) menegaskan bahwa inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi publik merupakan respons kreatif dan adaptif yang ditujukan untuk mengatasi tantangan-tantangan baru maupun permasalahan lama melalui pendekatan yang lebih efisien dan relevan. Sementara itu, United

Nations Development Program (UNDP) dalam Zulfa Nurdin (2006:15) mengklasifikasikan inovasi publik ke dalam beberapa jenis:

- a. Inovasi institusional, yakni pembaruan terhadap struktur kelembagaan atau pembentukan lembaga baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
- b. Inovasi organisasional, yang mencakup penggunaan metode manajemen, teknik administrasi, serta pola kerja baru dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Inovasi proses, yang fokus pada optimalisasi prosedur layanan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat.
- d. Inovasi konseptual, yaitu pengembangan model atau pendekatan baru dalam pemerintahan, seperti keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan dan penguatan jejaring antar lembaga.

Dengan menelaah berbagai pandangan di atas, dapat dipahami bahwa inovasi pelayanan publik merupakan penerapan gagasan baru, atau modifikasi terhadap sistem yang telah ada, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas layanan publik. Evaluasi kritis terhadap konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak semata bergantung pada kebaruannya, tetapi juga pada sejauh mana inovasi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.

Dalam kerangka tersebut, implementasi aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora diposisikan sebagai inovasi pelayanan publik digital yang ditopang

oleh aspek dukungan, kapasitas, dan nilai manfaat. Dari sisi dukungan (*support*), penerapan SILAT memerlukan landasan regulasi yang jelas serta kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan agar inovasi dapat dipahami dan diadopsi oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Selanjutnya, dari aspek kapasitas (*capacity*), keberhasilan implementasi inovasi ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Sementara itu, dari aspek nilai (*value*), SILAT diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kemudahan akses, peningkatan kecepatan layanan, dan transparansi administrasi pendidikan. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya merepresentasikan transformasi digital birokrasi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana implementasi inovasi mampu menghasilkan nilai pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

1.6.2.5 Implementasi Inovasi

Secara etimologis, istilah implementasi merujuk pada tindakan pelaksanaan atau penerapan suatu gagasan dalam praktik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu rencana, kebijakan, atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Secara konseptual, Haji (2020) menegaskan bahwa implementasi mencakup tahapan penerjemahan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam bentuk tindakan nyata yang memberikan dampak konkret, baik terhadap pengetahuan, keterampilan, maupun terhadap perubahan sikap dan nilai.

Lebih lanjut, McLaughlin dan Schubert (dalam Nurdin & Basyiruddin, dikutip dalam Magdalena et al., 2020) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian aktivitas yang saling menyesuaikan dalam suatu sistem yang bersifat rekayasa. Pemaknaan ini menekankan bahwa implementasi bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang kompleks, yang memerlukan koordinasi, integrasi, dan keterpaduan antar unsur. Penggunaan istilah “mekanisme” dalam konteks ini menunjukkan bahwa implementasi merupakan proses yang terstruktur dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada norma dan standar tertentu untuk mencapai hasil yang direncanakan.

Senada dengan itu, Mulyasa (dalam Harteti Jasin, 2021) juga mengartikan implementasi sebagai suatu proses transformasi ide atau kebijakan menjadi tindakan nyata yang menghasilkan perubahan signifikan dalam berbagai dimensi, termasuk aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dari individu atau kelompok yang menjadi sasaran.

Dengan mengintegrasikan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi. Proses ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan teknis semata, tetapi juga pada pencapaian dampak transformatif terhadap individu maupun institusi, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, maupun efisiensi operasional.

Dalam konteks implementasi inovasi pelayanan publik, seperti penerapan aplikasi SILAT oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, implementasi mencakup rangkaian aktivitas mulai dari perencanaan

strategis, penyesuaian sistem dan sumber daya, hingga pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberhasilan implementasi dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktural, dukungan sumber daya manusia, serta kesesuaian antara inovasi yang diterapkan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

1.6.2.6 E-government

E-Government merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi, menurunkan biaya layanan, serta memperluas akses informasi dan layanan publik secara transparan dan akuntabel. Wawan Setiawan (2017) menyatakan bahwa *E-Government* digunakan untuk memfasilitasi pelayanan publik secara lebih efektif dan responsif, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat.

Menurut The World Bank Group (dalam Suaedi, 2010), *E-Government* adalah bentuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki efektivitas pengambilan kebijakan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian layanan. Pendekatan ini bertujuan mengoptimalkan hubungan antara pemerintah dan warga negara melalui sistem yang lebih terbuka dan efisien.

Indriyani (2016) menambahkan bahwa *E-Government* bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan bagian dari proses pembaruan tata kelola pemerintahan menuju praktik *good governance*. Inovasi ini mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, memperluas partisipasi

masyarakat, serta meminimalisasi potensi penyimpangan birokrasi melalui pemanfaatan sistem yang terukur dan terdokumentasi secara digital.

Aprianty (2016) memperkuat pemahaman tersebut dengan menyebutkan bahwa *E-Government* adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang menggunakan jaringan internet, *wide area network*, dan *mobile computing* untuk mendukung pelayanan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini memungkinkan peningkatan efisiensi regulasi, efektivitas pelayanan, serta transparansi informasi pemerintah kepada publik.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, *E-Government* dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk inovasi digital yang bertujuan memperkuat efektivitas pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Evaluasi terhadap konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan *E-Government* sangat bergantung pada integrasi teknologi, kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kemauan birokrasi untuk bertransformasi.

Penerapan aplikasi SILAT oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora merupakan perwujudan nyata dari praktik E-Government di bidang pendidikan. Melalui aplikasi ini, layanan administrasi pendidikan diselenggarakan secara lebih mudah diakses, efisien, dan terstandarisasi, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.

1.6.2.7 Indikator Keberhasilan *E-Government*

Keberhasilan implementasi *E-Government* tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga pada sejauh mana sistem tersebut mampu memenuhi fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut Rianto, Budi, dkk. (2012), terdapat empat indikator utama yang menjadi ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan *E-Government*, yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi di pusat data, merupakan indikator pertama yang mencerminkan kesiapan infrastruktur informasi pemerintah. Data yang terpusat, terorganisasi, dan mudah diakses menjadi fondasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy making*), serta menjamin kontinuitas layanan lintas sektor.
2. Ketersediaan data dan informasi untuk mendukung promosi daerah, menjadi aspek strategis dalam memanfaatkan *E-Government* untuk pembangunan wilayah. Informasi yang dikelola secara digital memungkinkan peningkatan citra dan daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui penyebaran potensi lokal secara lebih luas dan terarah.
3. Akses terhadap aplikasi *E-Government* yang dapat membantu pekerjaan kantor dan pelayanan publik, menjadi indikator dalam mengukur efisiensi dan responsivitas birokrasi. Aplikasi yang dirancang untuk mendukung pekerjaan perkantoran dan pelayanan masyarakat akan mendorong penyederhanaan prosedur, percepatan pelayanan, serta pengurangan biaya birokrasi

4. Tersedianya aplikasi dialog publik untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat umum melalui email, SMS, dan konferensi jarak jauh (*teleconference*). Melalui kanal komunikasi digital, interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat berlangsung secara dua arah, membangun kepercayaan dan memperkuat akuntabilitas publik

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, keberhasilan *E-Government* dapat dinilai dari kapasitas sistem untuk menyediakan data yang andal, mendukung pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi layanan, dan memfasilitasi komunikasi yang inklusif. Evaluasi terhadap keempat aspek tersebut mencerminkan bahwa *E-Government* bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, melainkan sebagai pilar transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan aplikasi SILAT oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora juga dapat dianalisis berdasarkan keempat indikator tersebut. Aplikasi ini mendukung ketersediaan data pendidikan secara terintegrasi, mempermudah akses informasi bagi publik, meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pendidikan, serta membuka ruang komunikasi antara instansi pendidikan dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan E-Government dapat dioperasionalisasikan secara nyata melalui penerapan sistem digital di sektor-sektor pelayanan publik yang strategis.

1.6.2.8 Elemen Sukses Pengembangan *E-Government*

Elemen-elemen kunci dalam keberhasilan implementasi *e-Government* merupakan hasil studi dan penelitian yang dilakukan oleh Harvard John F. Kennedy School of Government pada tahun 2002. Lembaga ini merupakan bagian dari Universitas Harvard dan dikenal juga sebagai Harvard Kennedy School, berfokus pada pendidikan dan riset di bidang kebijakan publik serta administrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil kajian tersebut (dikutip dalam Indrajit, 2016:10–13), keberhasilan digitalisasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh tiga komponen fundamental yang saling berkaitan dan harus diperhatikan secara serius dalam proses perenapannya. Ketiga komponen tersebut adalah: dukungan kelembagaan (*support*), yang mencerminkan komitmen serta peran aktif pemerintah; kapasitas institusional (*capacity*), yang merujuk pada kemampuan sumber daya, infrastruktur, dan regulasi; serta nilai manfaat (*value*), yaitu sejauh mana transformasi digital memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketiga elemen ini menjadi kerangka analitis penting dalam menilai dan mengembangkan inisiatif e-Government secara efektif sebagai berikut:

a. *Support* (dukungan)

Elemen pertama yang sangat esensial dalam implementasi e-Government adalah adanya komitmen serius dari pihak pemerintah untuk mengadopsi dan menjalankan prinsip-prinsip digitalisasi pemerintahan secara autentik. Hal ini tidak boleh sekadar menjadi respons terhadap tren global atau bentuk keterpaksaan administratif semata (Indrajit, 2016:10). Tanpa kemauan politik dan administratif

yang kuat, berbagai program dan inisiatif pengembangan e-Government sulit untuk diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks birokrasi yang masih didominasi oleh pendekatan manajerial *top-down*, keberhasilan pelaksanaan *e-Government* sangat bergantung pada dukungan yang kuat dari pimpinan pemerintahan di level tertinggi. Dukungan ini kemudian menjadi fondasi bagi penerapan kebijakan di tingkat operasional yang lebih rendah. Bentuk dukungan tersebut mencakup antara lain:

a) Disepakatinya Regulasi *Electronic Government* yang Jelas

Kerangka kerja *electronic government* (*e-Government*) merupakan elemen strategis yang berperan penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah, sehingga layak memperoleh prioritas tinggi dalam agenda pembangunan nasional (Indrajit, 2016:11). Keberadaan kerangka ini juga merefleksikan komitmen pemerintah yang terwujud melalui landasan hukum yang kuat, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan formal yang mengatur pelaksanaan *e-Government* secara sistematis. Lebih lanjut, pembentukan institusi-institusi khusus sebagai pelaksana dan penanggung jawab turut menjadi indikator keseriusan negara dalam menciptakan ekosistem digital pemerintahan yang kondusif dan berkelanjutan. Hal demikian seperti yang dinyatakan oleh Andrea (2012:24) sebagai berikut:

“Proactive support by government leadership significantly enhances e-Government development. However, the different laws and regulations regarding privacy and

security can inhibit e-development. Government policy and related laws should be developed in order to support the development of information systems and technology. Its regulation should be compliant with e-Government strategy.”

Pernyataan Andrea menegaskan pentingnya keberadaan regulasi yang jelas, konsisten, dan tidak membingungkan sebagai prasyarat dalam pembangunan sistem e-Government. Kerangka hukum dan kebijakan yang solid menjadi fondasi utama untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan sistem informasi dan teknologi di lingkungan pemerintahan. Di samping itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan wujud konkret dukungan pemerintah dalam menjamin konsistensi dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, setiap tahapan dalam implementasi e-Government telah dibekali dengan pedoman yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun operasional.

Dalam konteks implementasi *e-Government*, dukungan dan komitmen aktif dari para penyelenggara pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting. Penyelenggara yang dimaksud mencakup pejabat pada berbagai tingkatan pemerintahan, seperti menteri di tingkat kementerian, kepala atau ketua di lembaga negara, serta bupati/wali kota, Sekretaris Daerah (Sekda), dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat pemerintahan daerah. Bentuk dukungan ini dapat diwujudkan melalui pernyataan resmi, instruksi langsung, maupun perintah yang ditujukan kepada jajaran pelaksana. Komitmen

tersebut harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, guna memastikan bahwa pengembangan e-Government berjalan secara terkoordinasi dari tingkat manajerial atas hingga pelaksana di lapangan, sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dan peran.

b) Disosialisasikannya Konsep *Electronic Government*

Sudah Proses sosialisasi mengenai implementasi electronic government (*e-Government*) perlu dilakukan secara menyeluruh, merata, dan konsisten, baik kepada aparatur pemerintah sebagai pelaksana maupun kepada masyarakat sebagai pengguna layanan (Indrajit, 2016:11). Strategi sosialisasi ini sebaiknya menggunakan pendekatan yang komunikatif dan simpatik agar mampu membangun pemahaman dan penerimaan yang lebih luas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan, tahapan penerapan, serta manfaat *e-Government* kepada publik, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif sekaligus memperoleh manfaat dari transformasi digital layanan publik. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam *OECD e-Government Studies* (2005:41), yang menekankan bahwa:

“In the meantime, another option for governments in this area is to provide user education in support of channel switching. This can involve indirect initiatives such as marketing the benefits of online services or incorporating education about how to access and use e-Government into any ICT skills development initiatives the public sector may be involved in.”

Menurut *OECD e-Government Studies*, sosialisasi pada tahap awal implementasi *e-Government* berfungsi sebagai

bentuk edukasi yang krusial bagi para pengguna, khususnya masyarakat umum. Edukasi ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pemahaman mengenai fungsi serta cara penggunaan aplikasi dan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah. Melalui proses sosialisasi yang efektif, diharapkan layanan *e-Government* tidak hanya dibangun secara teknis, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh publik. Dengan demikian, keberhasilan *e-Government* tidak semata ditentukan oleh kesiapan teknis pemerintah dan operator, tetapi juga oleh literasi digital masyarakat sebagai pengguna akhir sistem. Partisipasi aktif masyarakat dalam transformasi digital ini menjadi kunci bagi peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Winarso dan Nurbudi (2016:34) menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi dalam implementasi *e-Government* perlu dilakukan secara menyeluruh pada tiga tahap utama: saat proses pengembangan aplikasi atau layanan, pada fase awal penerapan, serta selama aplikasi atau layanan tersebut digunakan secara aktif. Materi sosialisasi harus disusun secara komunikatif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengguna. Idealnya, proses ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa informasi dapat diterima dan dipahami secara efektif oleh masyarakat. Pendekatan sosialisasi dapat mencakup pelibatan para pemangku kepentingan melalui forum-forum interaktif seperti seminar dan *Focus Group Discussion*

(FGD). Selain itu, pemanfaatan berbagai saluran komunikasi seperti media cetak, media elektronik, media sosial, serta pemasangan materi informasi di lokasi-lokasi strategis yang sering dikunjungi masyarakat, merupakan strategi yang penting dalam menjangkau audiens yang lebih luas.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Elemen kedua dalam keberhasilan *e-Government* menekankan pentingnya kapasitas institusional yang dimiliki oleh pemerintah untuk merealisasikan visi digitalisasi layanan publik. Kapasitas ini mencakup seluruh sumber daya yang tersedia—baik manusia, teknologi, keuangan, maupun organisasi—yang dapat dimobilisasi dan dioptimalkan guna mendukung implementasi *e-Government* secara efektif (Indrajit, 2016:12). Dalam konteks ini, Fountain (2003:43) menyoroti bahwa kapasitas kelembagaan memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam struktur birokrasi dan proses administrasi publik. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan *e-Government* sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu membangun dan mengelola kapasitas tersebut secara berkelanjutan.

Merujuk pada pandangan Fountain (2003:43), kapasitas pemerintah merupakan indikator utama yang mencerminkan sejauh mana kemampuan institusional dalam mengimplementasikan *e-Government* secara efektif. Ketika kapasitas yang dimiliki tidak mencukupi, hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk memburuknya citra dan kepercayaan publik terhadap

kompetensi pemerintah. Ketiadaan kapasitas yang memadai dapat memunculkan persepsi negatif, seperti anggapan bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan alokasi anggaran yang memadai, tidak memiliki infrastruktur teknologi yang layak, maupun ketidaksiapan aparatur dalam mengelola dan mengoperasikan sistem digital. Dalam konteks ini, terdapat tiga aspek utama yang berkaitan erat dengan elemen *capacity* dalam pengembangan *e-Government*.

a) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup

Ketersediaan anggaran atau sumber daya keuangan yang memadai merupakan faktor penting dalam menunjang penyediaan infrastruktur serta fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan *e-Government* (Indrajit, 2016:12). Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, sehingga meskipun dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah tetap dapat mencapai hasil maksimal baik dalam *output* maupun *outcome*. Menurut Fountain (2003:22), proses utama yang melibatkan berbagai instansi dan departemen dalam mengembangkan sistem informasi terintegrasi meliputi operasional, layanan, akses, serta kebijakan, termasuk dalam aspek pengaturan peraturan, legislasi, dan penganggaran. Hal ini menegaskan pentingnya peran alokasi anggaran sebagai bagian integral dari pengembangan *e-Government*.

Fountain (2003:22) menegaskan bahwa salah satu kemampuan krusial yang harus dimiliki pemerintah dalam mengarahkan pengembangan sistem informasi adalah

pengelolaan sumber daya finansial. Ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, serta untuk pelaksanaan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai yang terlibat dalam operasional *e-Government*. Dengan demikian, sumber daya finansial berperan sebagai fondasi yang memungkinkan terwujudnya ketersediaan sumber daya lainnya secara efektif.

b) Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Selain ketersediaan anggaran yang memadai, pemenuhan infrastruktur teknologi informasi juga merupakan aspek yang sangat krusial dalam pengembangan *e-Government*. Infrastruktur ini menjadi fondasi utama yang memungkinkan pelaksanaan berbagai layanan digital secara efektif dan efisien (Indrajit, 2016:12). Menyikapi hal tersebut, Fountain (2003:51) mengemukakan pandangan mengenai pentingnya keberadaan infrastruktur teknologi informasi sebagai pilar utama dalam mendukung integrasi dan operasionalisasi sistem informasi pemerintahan.

Berdasarkan pernyataan Fountain (2003:51), dapat disimpulkan bahwa infrastruktur teknologi informasi harus dirancang secara strategis untuk mendukung misi dan tujuan pemerintah, sehingga pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara

optimal. Winarso dan Nurbudi (2016:42) menambahkan bahwa infrastruktur ini mencakup fasilitas-fasilitas penting dalam pengembangan *e-Government*, seperti ruang khusus untuk pengelolaan dan pengoperasian aplikasi, media pengaduan seperti email dan platform media sosial, perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang handal, serta sistem basis data elektronik. Dengan demikian, infrastruktur teknologi informasi menjadi fondasi utama dalam membangun aplikasi dan layanan digital yang bersifat interaktif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Selain itu, komitmen pemerintah dalam pengembangan *e-Government* dapat diukur melalui tingkat integrasi dan saling keterhubungan antar aplikasi atau layanan yang disediakan. Winarso dan Nurbudi (2016:33) menyatakan bahwa kuatnya komitmen pemerintah tercermin dari kemampuannya mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan secara sinergis, sehingga masing-masing dapat saling melengkapi dan menutupi kekurangan yang mungkin ada pada aplikasi lain. Integrasi ini menjadi indikator penting dalam memastikan efektivitas dan kelancaran layanan publik berbasis elektronik.

c) Ketersediaan sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks *e-Government* merujuk pada pegawai atau operator yang memiliki kompetensi serta keahlian khusus yang diperlukan agar implementasi *e-Government* dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(Indrajit, 2016:12). Setelah pemenuhan prasarana, sarana, dan anggaran terpenuhi, kualitas kemampuan aparatur menjadi faktor krusial dalam mengoperasikan dan mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. SDM yang ideal dalam pengembangan *e-Government* adalah individu yang memiliki penguasaan teknologi serta kompetensi teknis yang memadai, sehingga mampu menjalankan layanan digital secara optimal.

Kesiapan aspek sumber daya manusia sangat penting dalam keberhasilan *e-Government*, sebagaimana dinyatakan oleh OECD *e-Government Studies* (2005:135) yang mengungkapkan bahwa “Pengetahuan dan keahlian staf TI cenderung tersebar dan tidak terintegrasi dalam pelaksanaan e-Government.” Oleh karena itu, pelayanan yang responsif dan efektif hanya dapat terwujud apabila SDM yang terlibat memahami secara mendalam tugas dan kompetensi masing-masing. SDM yang menjadi faktor kunci dalam pengembangan *e-Government* harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pengoperasian serta pengendalian teknologi informasi untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan layanan digital.

Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai, pelatihan menjadi komponen krusial yang harus mendapatkan perhatian serius. Pegawai maupun operator yang akan menjalankan tugas di bidang *e-Government* perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup agar dapat menjalankan peran mereka secara optimal. Mereka harus

memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka. Winarso dan Nurbudi (2016:39) menekankan pentingnya pelatihan sebagai sarana untuk memastikan bahwa pegawai memahami materi dasar, serta kewajiban dan peran mereka dalam mendukung pengembangan e-Government. Selain itu, pelatihan juga berfungsi sebagai wahana agar pegawai mampu mengenali dan merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

c. *Value* (nilai)

Elemen *support* dan *capacity* mencerminkan dua aspek utama dari perspektif pemerintah sebagai penyedia layanan (*supply side*). Namun, berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak ada pihak yang merasakan manfaat dari penerapannya. Dalam konteks ini, penerima manfaat utama bukanlah pemerintah itu sendiri, melainkan masyarakat atau para pemangku kepentingan yang menjadi pengguna layanan (*demand side*) (Indrajit, 2016:13). Pentingnya aspek manfaat ini ditegaskan oleh Fountain (2003:44), yang menyatakan bahwa:

“... and how e-Government initiatives can improve or enhance citizen engagement in the provision of publik goods. It may be that citizens value increased possibilities for participation as much as faster, smoother transactions with government. For example, citizens may wish to interact with state or local government units before contacting a federal agency. Outcomes related to govenance and citizenship differ from outcomes stated simply in terms of transaction cost reduction, efficiency, and speed.”

Fountain (2003:44) menyatakan bahwa salah satu manfaat utama dari pengembangan *e-Government* yang dirasakan oleh

masyarakat adalah peningkatan kualitas interaksi antara pemerintah dan warga, sehingga proses penyampaian layanan menjadi lebih efisien dan mudah diakses. Selain itu, *e-Government* juga berkontribusi dalam pengurangan biaya operasional, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat waktu pelayanan publik. Dampak positif ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan *e-Government*. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara cermat menentukan prioritas layanan digital yang akan dikembangkan terlebih dahulu agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

Perpaduan antara elemen *support*, *capacity*, dan *value* membentuk sebuah *nexus* atau pusat koordinasi strategis yang menjadi tulang punggung keberhasilan pengembangan *e-Government*. Indrajit (2016:10-13) menegaskan bahwa apabila fokus pemerintah dalam mengimplementasikan konsep *e-Government* tidak terpusat pada ketiga elemen ini, maka risiko kegagalan pengembangan *e-Government* akan meningkat secara signifikan. Secara ringkas, kemajuan digitalisasi memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan publik. Implementasi *e-Government* yang sukses sangat bergantung pada pemenuhan elemen-elemen kunci tersebut, yaitu dukungan dari pemerintah (*support*), kapasitas dan kemampuan pemerintah (*capacity*), serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat (*value*).

1.6.2.9 Inovasi Layanan Pendidikan Daerah melalui *e-Government*

Pelayanan publik berbasis digital pada sektor pendidikan daerah semakin mendapatkan perhatian sebagai bagian dari upaya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Inovasi digital dalam pendidikan tidak hanya menitikberatkan pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada bagaimana pemerintah daerah mengubah tata kelola, memperkuat kolaborasi lintas lembaga, dan memastikan bahwa teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok yang rentan, seperti anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS).

Inovasi aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah) di Kabupaten Blora merupakan salah satu layanan pendidikan daerah berbasis *e-Government*. Aplikasi ini sudah dirancang sebagai sistem yang mengintegrasikan data lintas sektor (pemerintah daerah, sekolah, pemerintah desa, masyarakat) guna mempercepat identifikasi, pemantauan, dan intervensi terhadap anak tidak sekolah. Dengan demikian, aplikasi SILAT bukan sekadar alat teknis, melainkan instrument kebijakan pendidikan daerah yang mengusung prinsip inklusivitas, transparansi, dan efisiensi layanan publik.

Pendekatan teoretis Harvard JFK (John F. Kennedy School of Government) memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami efektivitas implementasi inovasi digital seperti SILAT. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *e-Government* ditentukan oleh keterpaduan tiga elemen fundamental—support, capacity, dan value—yang secara bersama membentuk *nexus* koordinatif bagi

transformasi digital sektor publik (Indrajit, 2006; Heeks, 2001). Dalam konteks inovasi layanan pendidikan daerah, ketiga elemen tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. *Support* (Dukungan Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Daerah)

Elemen *support* mencerminkan legitimasi politik, dukungan regulatif, serta kepemimpinan birokrasi dalam mengarahkan kebijakan digital daerah. Dalam kasus implementasi SILAT, dukungan politik dari kepala daerah dan Dinas Pendidikan menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan sistem.

Kebijakan yang memandatkan integrasi data ATS antar-instansi memperkuat legitimasi inovasi ini, sekaligus menunjukkan bagaimana *support* berfungsi sebagai fondasi normatif bagi perubahan tata kelola pendidikan berbasis teknologi. Tanpa dukungan struktural yang memadai, inovasi digital cenderung berhenti pada tataran proyek, bukan menjadi kebijakan institusional (Indrasari et al., 2023).

2. *Capacity* (Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Daerah)

Elemen *capacity* berfokus pada kemampuan organisasi publik untuk menerjemahkan kebijakan digital ke dalam praktik implementatif yang efektif. Kapasitas mencakup kualitas sumber daya manusia (operator sekolah, tenaga teknis, dan aparatur dinas), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta

kemampuan manajerial dalam mengolah data ATS menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Keberhasilan implementasi inovasi SILAT ditentukan oleh sejauh mana lembaga pendidikan daerah mampu memanfaatkan sistem informasi tersebut untuk mendukung perencanaan intervensi pendidikan yang berbasis data. Keberadaan elemen *capacity* akan sangat menentukan seberapa besar dukungan politik dapat diwujudkan dalam tindakan administratif yang nyata (Heeks, 2002).

3. *Value* (Nilai dan Manfaat Sosial Bagi Masyarakat Pendidikan)

Elemen *value* menekankan penciptaan nilai publik (*public value*) sebagai ukuran keberhasilan implementasi inovasi. Dalam konteks SILAT, nilai publik terwujud dalam bentuk peningkatan efisiensi pendataan ATS, transparansi informasi pendidikan, dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Elemen *value* juga bersifat sosial: masyarakat memperoleh manfaat dari keterbukaan data, peningkatan partisipasi, dan kecepatan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Blora. Inovasi aplikasi SILAT bahkan tidak hanya dinilai dari keberfungsian sistem digital, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut menghasilkan nilai sosial dan keadilan pendidikan yang dirasakan masyarakat (Moore, 1995; Sumarno, 2023).

Sinergi antara *support*, *capacity*, dan *value* membentuk suatu nexus inovasi pendidikan daerah, yakni ruang koordinatif yang memungkinkan interaksi berkelanjutan antara kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, serta nilai sosial yang dihasilkan oleh sistem pemerintahan digital. Keterpaduan ketiga elemen tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi layanan pendidikan tidak bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh hubungan timbal balik yang dinamis. Dukungan kebijakan (*support*) menjadi prasyarat bagi peningkatan kapasitas kelembagaan (*capacity*), sedangkan kapasitas yang kuat berkontribusi langsung terhadap penciptaan nilai publik (*value*). Nilai publik yang terbentuk melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, transparansi data, dan partisipasi masyarakat kemudian memperkuat legitimasi kebijakan serta memperluas penerimaan sosial terhadap inovasi tersebut (Moore, 1995).

Implementasi aplikasi SILAT di Kabupaten Blora merepresentasikan penerapan konkret dari teori Harvard JFK dalam ranah pendidikan daerah. Hubungan antara *support*, *capacity*, dan *value* tercermin dalam praktik pengelolaan sistem digital yang terintegrasi, di mana dukungan kebijakan daerah menyediakan kerangka normatif, kapasitas kelembagaan menjamin efektivitas operasional, dan nilai sosial memastikan keberlanjutan inovasi. Perspektif ini memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital pendidikan tidak ditentukan semata oleh ketersediaan teknologi, tetapi oleh keseimbangan antara legitimasi politik, kemampuan institusional, dan manfaat sosial yang tercipta. Aplikasi SILAT berperan sebagai instrumen kebijakan publik

yang memperkuat tata kelola pendidikan berbasis data, meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pelayanan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan serta pemerataan akses pendidikan di tingkat daerah.

1.6.2.10 Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi

Menciptakan atau mengembangkan inovasi, terutama dalam organisasi sektor publik tentu akan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat maupun mendorong kualitas pelayanan, yang pada akhirnya memengaruhi penilaian masyarakat berdasarkan pengalaman mereka.

a. Faktor Pendukung Inovasi

Faktor pendukung merujuk pada berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian dukungan yang dapat membantu keberhasilan program inovasi dalam pelayanan publik. Faktor pendukung ini bisa berasal dari sisi internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang mendorong pelaksanaan inovasi dalam pelayanan publik antara lain sebagai berikut (Prabowo, H., dkk, 2022).

1. Faktor Kesadaran Aparatur

Menurut Prabowo dkk. (2022), kesadaran aparatur merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan inovasi pelayanan publik. Kesadaran ini mencakup pemahaman, motivasi, dan kemauan aparatur untuk terlibat aktif dalam proses perubahan. Inovasi akan sulit berhasil

apabila aparaturnya masih berorientasi pada rutinitas birokratis tanpa memahami nilai strategis inovasi tersebut.

Dalam implementasi aplikasi SILAT, kesadaran aparaturnya terlihat dari sejauh mana pegawai memahami urgensi pendataan anak tidak sekolah sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan daerah. Namun, di lapangan masih ditemukan variasi tingkat kesadaran antarunit kerja: sebagian aparaturnya aktif melakukan pembaruan data, sementara sebagian lain cenderung pasif dan menunggu instruksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran aparaturnya menjadi kunci keberlanjutan inovasi digital di sektor publik.

2. Faktor Aturan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik

Aturan berperan sebagai instrumen pengendali dan penjamin keberlanjutan inovasi. Dalam kerangka teori Prabowo, kejelasan regulasi memperkuat legitimasi inovasi dan mengurangi resistensi birokrasi. Penerapan aplikasi SILAT didukung oleh kebijakan daerah yang menjadi acuan operasional bagi seluruh perangkat daerah, sehingga inovasi berjalan dalam koridor hukum yang jelas.

3. Faktor Organisasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik

Prabowo dkk. (2022) menekankan pentingnya aturan dan regulasi sebagai instrumen pengarah inovasi. Regulasi berfungsi menciptakan kepastian hukum, membatasi ruang ambiguitas, serta mengatur peran antaraktor dalam birokrasi. Tanpa dasar hukum yang jelas, inovasi rentan terhenti karena tidak memiliki legitimasi kelembagaan.

Dalam implementasi aplikasi SILAT, Pemerintah Kabupaten Blora telah menerbitkan Surat Keputusan dan pedoman pelaksanaan sebagai dasar operasional. Namun, di lapangan masih terdapat kekosongan dalam regulasi teknis, seperti mekanisme pertukaran data antarinstansi atau pelimpahan tanggung jawab dalam pemutakhiran data. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan aspek regulatif agar inovasi dapat berjalan lebih konsisten dan terkoordinasi.

4. Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Faktor organisasi dalam teori Prabowo berkaitan dengan kapasitas struktur birokrasi, koordinasi antarunit, serta budaya kerja yang mendukung inovasi. Organisasi publik yang adaptif harus mampu mengelola kolaborasi lintas sektor dan memfasilitasi aliran informasi secara efektif.

Implementasi aplikasi SiLat melibatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, serta perangkat kecamatan dan desa. Kolaborasi ini menunjukkan adanya integrasi fungsi kelembagaan dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik. Namun, hambatan komunikasi vertikal dan keterlambatan pengambilan keputusan masih sering terjadi akibat hierarki birokrasi yang panjang. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas inovasi.

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut Prabowo dkk. (2022), kemampuan dan keterampilan aparatur menentukan keberhasilan adopsi inovasi, terutama yang berbasis teknologi. Aparatur yang memiliki literasi digital rendah akan

kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem baru, sehingga menghambat implementasi inovasi.

Dalam penerapan aplikasi SILAT, aparaturnya di tingkat kecamatan dan desa masih memiliki keterbatasan dalam menggunakan perangkat lunak dan mengelola data digital. Hal ini menyebabkan proses input data berjalan lambat dan tidak seragam. Pemerintah daerah telah melakukan pelatihan dasar, tetapi belum dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi syarat utama keberhasilan inovasi digital di bidang pelayanan publik.

Fokus dalam penelitian ini adalah pada aspek kesadaran aparaturnya, aturan, dan organisasi karena ketiga faktor ini secara bersama-sama menentukan keberhasilan implementasi inovasi SILAT di Kabupaten Blora. Kesadaran aparaturnya penting dalam memastikan pegawai memahami urgensi pendataan anak tidak sekolah dan terlibat aktif dalam proses inovasi, sementara aturan dan regulasi memberikan legitimasi serta kepastian hukum agar inovasi berjalan konsisten. Faktor organisasi mencakup koordinasi lintas unit dan struktur birokrasi yang mendukung kolaborasi efektif. Penekanan pada ketiga faktor ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menegaskan bahwa kesadaran SDM, regulasi yang jelas, dan kapasitas organisasi menjadi fondasi utama keberhasilan inovasi publik berbasis teknologi (Prabowo dkk., 2022; Maulani et al., 2021).

b. Faktor Penghambat Inovasi

Inovasi tidak selalu berlangsung lancar atau tanpa hambatan. Banyak kasus inovasi yang justru terhalang oleh berbagai faktor. Dalam hal ini, Geoff Mulgan dan David Albury (2003) mengemukakan delapan faktor penghambat yang dapat menghalangi berkembangnya inovasi, yaitu sebagai berikut.

1. Keengganan menutup program yang gagal

Mulgan dan Albury (2003) menjelaskan bahwa keengganan untuk menghentikan program yang tidak efektif mencerminkan rendahnya kapasitas pembelajaran organisasi dalam sektor publik. Organisasi publik cenderung mempertahankan program lama karena kekhawatiran terhadap risiko politik, kehilangan legitimasi, atau citra kelembagaan. Sikap tersebut mengakibatkan inovasi tidak memperoleh ruang optimal untuk berkembang dan menggantikan sistem yang usang.

Mekanisme pendataan anak tidak sekolah dalam observasi awal masih terdapat pencatatan yang dilakukan secara manual oleh beberapa perangkat desa. Dualisme sistem administrasi ini tentu menimbulkan duplikasi data pada aplikasi SILAT, sehingga dapat memengaruhi ketidakefisienan waktu, dan beban kerja tambahan. Kecenderungan mempertahankan prosedur konvensional tersebut menghambat proses adopsi penuh terhadap inovasi digital dan memperlemah efektivitas kebijakan pendataan pendidikan.

2. Ketergantungan berlebih pada *high performer*

Mulgan dan Albury (2003) mengemukakan bahwa ketergantungan berlebih terhadap individu berprestasi (*high*

performer) menjadi salah satu hambatan struktural dalam inovasi sektor publik. Keberhasilan inovasi yang hanya bertumpu pada individu tertentu menyebabkan organisasi kehilangan kapasitas kelembagaan untuk mempertahankan dan mengembangkan inovasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi belum memiliki sistem pembelajaran dan mekanisme berbagi pengetahuan yang efektif untuk menjaga keberlanjutan inovasi.

Pelaksanaan aplikasi SiLat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menunjukkan gejala ketergantungan terhadap pegawai yang memiliki kemampuan teknologi informasi lebih baik dibandingkan yang lain. Proses input, validasi, dan pembaruan data anak tidak sekolah sering terhambat ketika pegawai kunci berpindah tugas atau tidak aktif. Ketiadaan sistem pelatihan berkelanjutan dan rotasi berbasis kompetensi memperkuat ketergantungan ini, sehingga inovasi tidak berjalan sebagai bagian dari sistem kelembagaan, tetapi masih bersifat individual dan temporer.

3. Budaya atau organisasi

Budaya organisasi birokrasi yang kaku dan hierarkis sering kali menjadi hambatan paling sulit diubah. Mulgan dan Albury menegaskan bahwa kegagalan inovasi publik lebih sering disebabkan oleh budaya organisasi yang tidak mendukung daripada oleh kurangnya sumber daya.

Dalam implementasi aplikasi SILAT, masih terdapat aparatur yang memandang inovasi digital sebagai tugas tambahan, bukan bagian integral dari reformasi pelayanan. Rendahnya keterbukaan

terhadap perubahan menyebabkan koordinasi antarinstansi menjadi lambat dan komunikasi cenderung bersifat vertikal. Kondisi ini menggambarkan bagaimana budaya organisasi konservatif dapat memperlambat proses adopsi inovasi.

4. Tidak ada penghargaan atau insentif

Mulgan dan Albury (2003) menyoroti ketiadaan sistem penghargaan yang memadai dapat menghambat munculnya perilaku inovatif dalam organisasi publik. Penghargaan, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial, berfungsi sebagai penguat motivasi aparatur untuk berpartisipasi aktif dalam inovasi dan mempertahankan kinerja yang kreatif. Tanpa mekanisme insentif, inovasi kehilangan daya dorong sosial dan psikologis yang diperlukan untuk keberlanjutan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora belum memiliki kebijakan yang memberikan penghargaan khusus bagi pegawai yang berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi aplikasi SILAT. Seluruh aparatur diperlakukan dalam kerangka kerja administratif yang sama tanpa diferensiasi kinerja berbasis kontribusi inovasi. Kondisi ini menurunkan motivasi pegawai dalam memperbarui data secara proaktif dan mengurangi rasa kepemilikan terhadap sistem. Akibatnya, inovasi tidak berkembang sebagai praktik profesional, melainkan hanya sebagai instruksi struktural.

5. Ketidakmampuan mengambil resiko dan perubahan

Mulgan dan Albury (2003) menyatakan bahwa kemampuan organisasi publik dalam mengelola risiko menjadi prasyarat penting

bagi keberhasilan inovasi. Organisasi yang cenderung menghindari risiko tidak memiliki fleksibilitas dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan. Kegagalan dalam menyeimbangkan antara kepatuhan prosedural dan keberanian mengambil risiko akan membatasi ruang inovasi dan memperlambat proses transformasi.

Pada observasi awal masih menunjukkan ada kecenderungan menghindari penggunaan penuh aplikasi SILAT karena kekhawatiran terhadap kesalahan input data atau potensi kesalahan administrative oleh beberapa perangkat desa. Ketiadaan pelatihan teknis yang berkelanjutan memperkuat persepsi bahwa inovasi digital berisiko menimbulkan kesalahan yang dapat berdampak pada tanggung jawab individu. Sikap defensif ini mengakibatkan rendahnya adopsi teknologi dan lambatnya integrasi sistem informasi ke dalam mekanisme pelayanan pendidikan daerah

6. Anggaran jangka pendek dan perencanaan

Siklus inovasi publik membutuhkan dukungan pendanaan dan perencanaan jangka panjang agar dapat berjalan berkesinambungan. Ketergantungan pada siklus anggaran tahunan membuat inovasi sering kali terhenti pada tahap implementasi awal, tanpa adanya proses evaluasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan.

Aplikasi SILAT di Kabupaten Blora masih bergantung pada alokasi anggaran tahunan yang terbatas. Pemeliharaan sistem, pembaruan fitur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki rencana pembiayaan multi-tahun yang terstruktur.

Situasi ini menyebabkan pelaksanaan inovasi berjalan reaktif dan tidak memiliki kesinambungan dalam penguatan kualitas. Akibatnya, potensi SiLat sebagai instrumen manajemen pendidikan berbasis data belum termanfaatkan secara optimal.

7. Tekanan dan hambatan administratif

Beban administratif yang berlebihan dapat menghambat kreativitas dan efektivitas inovasi dalam sektor publik. Prosedur yang berlapis dan kompleks mengalihkan fokus organisasi dari substansi inovasi menuju pemenuhan kewajiban formal. Hal ini menciptakan inefisiensi dan menurunkan motivasi aparatur dalam melaksanakan perubahan.

Dalam praktik di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, pembaruan dan validasi data anak tidak sekolah melalui aplikasi SILAT memerlukan proses verifikasi berjenjang dari tingkat sekolah hingga pejabat struktural dinas. Kompleksitas prosedur ini memperlambat respons terhadap dinamika lapangan dan menghambat ketersediaan data real-time. Tekanan administratif tersebut mengurangi efektivitas inovasi digital yang seharusnya berfungsi mempercepat alur pelayanan publik.

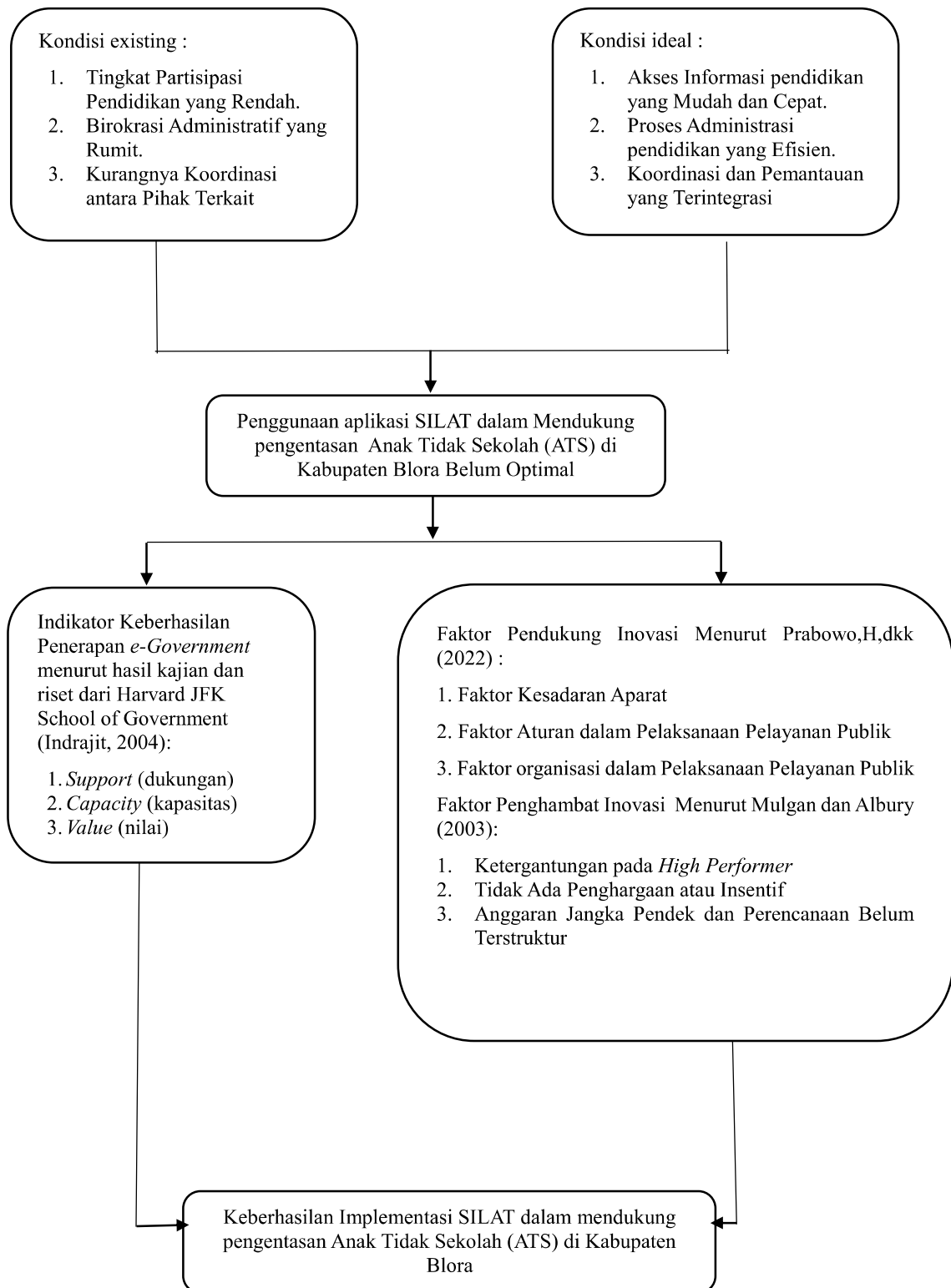
8. Budaya *risk aversion*

Resiko Budaya *risk aversion* dalam organisasi publik menggambarkan kecenderungan untuk menghindari kesalahan dan mempertahankan stabilitas prosedural. Mulgan dan Albury (2003) memandang fenomena ini sebagai bentuk resistensi psikologis terhadap perubahan yang menghalangi proses pembelajaran dan

eksperimentasi organisasi. Budaya yang menolak risiko menghambat kemampuan institusi dalam menghasilkan terobosan baru yang adaptif terhadap kebutuhan publik.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil faktor penghambat inovasi, yaitu ketergantungan pada *high performer*, ketiadaan penghargaan atau insentif, dan anggaran jangka pendek serta perencanaan yang belum terstruktur, karena ketiga faktor ini secara nyata memengaruhi implementasi SILAT di Kabupaten Blora. Ketergantungan berlebihan pada pegawai kunci menyebabkan proses input dan pemutakhiran data anak tidak sekolah terhambat saat mereka tidak hadir (Mulgan & Albury, 2003). Ketiadaan sistem penghargaan dan insentif menurunkan motivasi aparatur untuk memperbarui data secara proaktif dan mengurangi rasa kepemilikan terhadap aplikasi (Mulgan & Albury, 2003). Sementara itu, anggaran yang terbatas pada siklus tahunan membuat pemeliharaan sistem, peningkatan kapasitas operator, dan pengembangan fitur SILAT berjalan reaktif, sehingga inovasi belum berjalan berkelanjutan (Prabowo dkk., 2022). Dengan demikian, fokus pada ketiga faktor penghambat ini penting untuk memahami kendala dalam penerapan SILAT dan upaya mendukung pengentasan ATS di Blora.

1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

Sumber : diolah oleh penulis 2025

1.7.1 Fenomena Penelitian dan Pertanyaan Wawancara

Tabel 0.1 Fenomena dan pertanyaan wawancara

No.	Rumusan Masalah	Fenomena	Indikator fenomena	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana proses implementasi inovasi Sistem Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu (SILAT) di Kabupaten Blora dalam menunjang pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS)?	1.1 <i>Support</i> (dukungan)	- Adanya komitmen politik dari pejabat publik dan pemimpin pemerintah untuk mendukung implementasi aplikasi SILAT. - Tersedianya kebijakan dan peraturan yang mendukung digitalisasi sektor publik. - Pelaksanaan sosialisasi aplikasi SILAT kepada birokrasi dan masyarakat secara luas melalui kampanye yang efektif dan komunikatif.	- Sejauh mana kerangka kebijakan dari pejabat publik, seperti Presiden, Gubernur, atau Walikota/Bupati, berperan dalam implementasi aplikasi SILAT di daerah Blora? - Bagaimana proses sosialisasi inovasi SILAT dilakukan di kalangan birokrasi dan masyarakat? Apakah sudah ada kampanye yang menarik untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat? - Apa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan aplikasi SILAT sebagai prioritas utama dalam agenda pendukung pengentasan ATS?
		2.1 <i>Capacity</i> (Kapasitas)	- Ketersediaan dana yang cukup untuk pengembangan dan implementasi aplikasi SILAT. - Infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung operasional aplikasi SILAT. - Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam menjalankan aplikasi SILAT.	- Apakah pemerintah daerah memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung pengembangan dan implementasi aplikasi SILAT? - Sejauh mana infrastruktur teknologi informasi di daerah ini memadai untuk mendukung operasional aplikasi SILAT? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam hal ini?

				3. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan aplikasi SILAT memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan? Apa pelatihan atau pendidikan yang diberikan?
		3. <i>Value</i> (Nilai)	1. Efektivitas layanan SILAT dalam memfasilitasi identifikasi, pendaftaran, dan penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS). 2. Tingkat akurasi dan kecepatan data ATS yang dihasilkan aplikasi SILAT. 3. Responsivitas layanan SILAT terkait kepastian waktu penyelesaian administrasi dan tindak lanjut kasus ATS.	1. Se jauh mana aplikasi SILAT berhasil mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan memproses kasus Anak Tidak Sekolah (ATS)? 2. Bagaimana akurasi data ATS yang disajikan oleh SILAT dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya? 3. Apakah ada standar waktu yang pasti mengenai penyelesaian layanan administrasi terkait ATS melalui SILAT? Bagaimana responsivitas tindak lanjut jika ada kasus ATS yang sudah terdata?
2	Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi inovasi SILAT dalam menunjang pengentasan ATS di Kabupaten Blora?	1. Faktor Kesadaran Aparat	1. Kesadaran akan Tugas dan Tanggung Jawab 2. Komitmen terhadap Pelayanan 3. Peningkatan Kapasitas Aparat	1. Bagaimana aparat melihat pentingnya penggunaan aplikasi ini dalam meningkatkan efektivitas penanganan ATS? 2. Apakah Anda merasa memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebijakan yang diterapkan dalam penanganan ATS? 3. Seberapa besar keterlibatan aparat dalam proses implementasi aplikasi SILAT di lapangan?

				4. Apakah Anda telah menerima pelatihan atau pembekalan terkait penanganan ATS? Jika iya, bagaimana pelatihan tersebut membantu Anda dalam pekerjaan sehari-hari?	1. Apakah aparat memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam aplikasi untuk mengelola data ATS? 2. Apakah ada petunjuk yang jelas mengenai cara penggunaan aplikasi SILAT dalam penanganan ATS? 3. Bagaimana upaya pemantauan dan penegakan aturan yang terkait dengan penggunaan aplikasi SILAT?	1. Kepatuhan terhadap Peraturan Pedoman Penggunaan Aplikasi 2. Kejelasan Aturan dalam Implementasi Aplikasi		4. Apakah Anda telah menerima pelatihan atau pembekalan terkait penanganan ATS? Jika iya, bagaimana pelatihan tersebut membantu Anda dalam pekerjaan sehari-hari?
		2. Faktor Aturan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik		1. Kepatuhan terhadap Peraturan Pedoman Penggunaan Aplikasi 2. Kejelasan Aturan dalam Implementasi Aplikasi	1. Apakah aparat memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam aplikasi untuk mengelola data ATS? 2. Apakah ada petunjuk yang jelas mengenai cara penggunaan aplikasi SILAT dalam penanganan ATS? 3. Bagaimana upaya pemantauan dan penegakan aturan yang terkait dengan penggunaan aplikasi SILAT?	1. Kepatuhan terhadap Peraturan Pedoman Penggunaan Aplikasi 2. Kejelasan Aturan dalam Implementasi Aplikasi		4. Apakah Anda telah menerima pelatihan atau pembekalan terkait penanganan ATS? Jika iya, bagaimana pelatihan tersebut membantu Anda dalam pekerjaan sehari-hari?
		3. Faktor Organisasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik		1. Struktur Organisasi yang Mendukung Implementasi Koordinasi Antar Unit Organisasi 2. Efektivitas Prosedur dan Sistem	1. Sejauh mana struktur organisasi di instansi terkait mendukung implementasi aplikasi SILAT untuk menangani ATS? 2. Apakah ada unit atau bagian khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan aplikasi SILAT dalam program penanganan ATS? 3. Bagaimana koordinasi antar unit atau instansi dalam menggunakan aplikasi SILAT untuk penanganan ATS? 4. Bagaimana sistem dan prosedur yang ada dalam organisasi mendukung implementasi aplikasi SILAT dalam menangani ATS?	1. Struktur Organisasi yang Mendukung Implementasi Koordinasi Antar Unit Organisasi 2. Efektivitas Prosedur dan Sistem		4. Apakah Anda telah menerima pelatihan atau pembekalan terkait penanganan ATS? Jika iya, bagaimana pelatihan tersebut membantu Anda dalam pekerjaan sehari-hari?
3.	Faktor penghambat implementasi inovasi	1. Ketergantungan pada <i>high performer</i>		1. Ketidaksiapan Tim saat <i>High Performer</i> tidak hadir 2. Frekuensi konsultasi atau permintaan bantuan yang berlebihan. 3. Prosedur yang tidak efisien	1. Apa yang biasanya terjadi ketika <i>high performer</i> tidak hadir atau sedang tidak bisa membantu pendataan pada inovasi SILAT? 2. Menurut Anda, apa alasan anggota tim sangat bergantung pada <i>high performer</i> untuk penyelesaian tugas input inovasi SILAT? 3. Apakah alur pelaporan dan pendataan ATS menjadi terhambat saat penerapan inovasi SILAT?	1. Ketidaksiapan Tim saat <i>High Performer</i> tidak hadir 2. Frekuensi konsultasi atau permintaan bantuan yang berlebihan. 3. Prosedur yang tidak efisien		4. Apakah Anda telah menerima pelatihan atau pembekalan terkait penanganan ATS? Jika iya, bagaimana pelatihan tersebut membantu Anda dalam pekerjaan sehari-hari?

	2. Tidak Ada Penghargaan atau Insentif	1. <i>Turnover</i> atau perpindahan karyawan tinggi 2. Rendahnya motivasi dalam menerapkan inovasi SILAT. 3. Persepsi ketidakadilan dalam pemberian <i>reward</i> .	1. Apakah sering terjadi pergantian operator desa/sekolah dalam pendataan anak tidak sekolah ketika inovasi SILAT diterapkan? 2. Apakah operator merasa mendapat dukungan (misal pelatihan, insentif) untuk menggunakan SILAT secara optimal? 3. Apa saran Anda agar reward atau penghargaan lebih adil dan mendorong kinerja operator SILAT??	
	3. Anggaran Jangka Pendek dan Perencanaan Belum Terstruktur	1. Masih minimnya anggaran jangka pendek dalam penerapan inovasi SILAT. 2. Terhambatnya koordinasi dalam implementasi inovasi SILAT. 3. Kesulitan pengadaan teknologi dan sarana dalam mendukung pelaksanaan inovasi SILAT.	1. Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung kegiatan rutin dan inovasi pada penerapan SILAT? 2. Bagaimana koordinasi antara desa, sekolah, dan operator SILAT untuk menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang terbatas? 3. Apa dampak keterbatasan anggaran terhadap pengadaan jaringan internet atau perangkat komputer atau laptop dalam mendukung implementasi inovasi SILAT?	

Sumber: diolah oleh penulis 2025

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:2). Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting, sebab ketepatan dalam memilih metode penelitian akan mengatur arah dan tujuan penelitian serta menentukan kualitas hasil penelitian.

1.8.1 Tipe penelitian

Pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran atau penjelasan mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti yaitu implementasi inovasi pelayanan publik dengan menjelaskan data-data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya sehingga memberikan gambaran secara obyektif mengenai keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya.

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, sehingga dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis implementasi inovasi aplikasi sistem layanan administrasi pendidikan terpadu (SILAT) di Kabupaten Blora.

1.8.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Blora. Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Fokus penelitian tentang implementasi inovasi aplikasi sistem layanan administrasi pendidikan terpadu (SILAT) di Kabupaten Blora.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora yaitu:

a) Data tertulis

Data tertulis yang digunakan yaitu regulasi yang berkaitan dengan implementasi inovasi aplikasi SILAT.

b) Data Gambar

Data yang disajikan dalam bentuk gambar, seperti dalam penelitian ini menyajikan gambar aplikasi SILAT yang masih belum berjalan dengan baik.

c) Data Tabel

Data yang disajikan dalam bentuk tabel, seperti penelitian ini menyajikan tabel survey kepuasan masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga kombinasi jenis data diatas untuk mendapatkan data yang relevan dan konkrit, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

1.8.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu yang memiliki pemahaman yang relevan dan mampu memberikan data serta informasi kepada peneliti mengenai fenomena yang sedang diteliti. Seleksi informan tidak hanya didasarkan pada kehadiran mereka, tetapi juga dipertimbangkan kemampuan dan relevansi terhadap masalah penelitian. Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*. Peneliti telah memilih informan-informan dengan menggunakan teknik *snowball* yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini berdasarkan kredibilitas mereka yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan di kabupaten tentu memiliki wawasan yang luas mengenai perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pendidikan, termasuk aplikasi SILAT. Ia dapat memberikan pandangan terkait tujuan strategis penggunaan aplikasi ini, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap sistem pendidikan di Blora.
2. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Blora memiliki peran langsung dalam melakukan implementasi aplikasi SILAT di tingkat pendidikan dasar. Informasi yang diperoleh akan sangat berguna untuk mengetahui bagaimana aplikasi ini diterapkan di sekolah-sekolah dasar, kendala yang dihadapi, dan bagaimana proses pembinaan yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan penggunaan aplikasi dalam kegiatan pendidikan dasar di Kabupaten Blora.

3. Perangkat Desa Klopoduwur sebagai pengguna aplikasi SILAT, memiliki peran penting dalam memperoleh informasi tentang proses implementasi aplikasi SILAT di tingkat desa. Penyempurnaan informasi terkait dengan implementasi aplikasi akan lebih berfokus pada tingkat lokal, termasuk dukungan yang diberikan kepada masyarakat dan sekolah, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan aplikasi tersebut di tingkat desa.
4. Masyarakat Desa Klopoduwur pengguna aplikasi SILAT, terutama orang tua atau warga yang terlibat langsung dalam aplikasi ini, dapat memberikan perspektif mengenai seberapa efektif aplikasi ini dalam memfasilitasi proses pendidikan. Mereka dapat memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi, apakah aplikasi tersebut bermanfaat atau tidak, serta permasalahan yang dihadapi dari sisi pengguna yang mungkin tidak terlihat oleh pihak pengelola atau pemerintah.

1.8.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2019). Peneliti kualitatif, sebagai *human instrument* bertujuan menentukan fokus penelitian, penentuan informan, pengumpulan data, penilaian kualitas data, menganalisis data, menginterpretasikan data dan memutuskan hasilnya (Sugiyono, 2019). Alat-alat yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, handphone, alat perekam dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian terkait implementasi inovasi aplikasi SILAT oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan:

a. Wawancara

Menurut Denzim (Fadhallah, 2021) wawancara adalah percakapan face to face (tatap muka), dimana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang faktual terkait implementasi inovasi SILAT, yang menjadi informan kunci merupakan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan penanggung jawab bagian pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pengguna aplikasi SILAT. Peneliti dalam mengambil data dengan melakukan percakapan seperti biasa yang dilakukan dengan narasumber sehingga narasumber tidak merasa sedang diwawancarai. Sedangkan dengan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blora peneliti akan menggunakan wawancara semi terbuka dimana peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan yang akan dikembangkan.

b. Observasi

Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis kegiatan serta interaksi subjek penelitian.

Segala hal yang dilihat dan didengar selama observasi dapat dicatat dan direkam dengan cermat sesuai dengan tema dan permasalahan yang sedang diteliti.

Menurut Moleong (2005), alasan melakukan observasi dalam penelitian untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan yang rumit dan untuk membantu mengetahui perilaku manusia. Peneliti melakukan observasi dengan mendatangi secara langsung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan melihat secara langsung penggunaan aplikasi SILAT.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat berupa pencarian dokumen berbentuk publikasi resmi, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hal yang diamati bukan benda hidup melainkan benda mati. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti mencari dokumendokumen data dan informasi dari mana saja sepanjang dokumen tersebut berkaitan dengan topik difusi inovasi. Penelitian ini menggunakan dokumen diantaranya jurnal ilmiah dan regulasi yang berkaitan dengan topik difusi inovasi.

1.8.7 Metode Analisis Data

Analisis secara etimologis berarti proses memisahkan, menguraikan, atau memeriksa secara cermat terhadap suatu objek untuk menemukan makna yang mendalam. Dalam konteks penelitian, analisis data merupakan kegiatan menelaah, memahami, dan menafsirkan data agar dapat ditarik kesimpulan yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Sirajuddin Saleh (2017:74), analisis data dapat diartikan sebagai proses menyikapi data dengan cara menyusun, memilah,

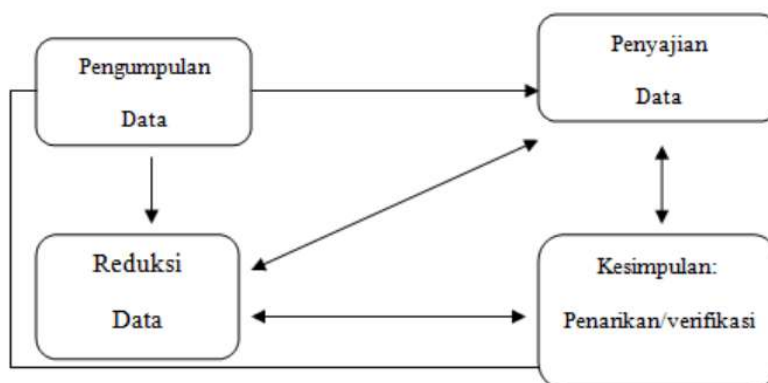
dan mengolahnya ke dalam bentuk yang sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Menurut Arikunto (2006, 160), analisis data adalah proses pengerjaan dan pemanfaatan data sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam analisis data, peneliti menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu:

- a) Proses 1: Peringkasan data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti melakukan peringkasan data terkait dengan implementasi inovasi dan faktor yang memengaruhi inovasi aplikasi SILAT. Adanya data yang diringkas akan menyampaikan masukan terkait hasil dari observasi yang dilakukan.
- b) Proses 2: Penyajian Data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan melalui mendeskripsikan implementasi inovasi, permasalahan implementasi inovasi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi inovasi dengan menggunakan teks yang bersifat naratif serta dukungan data tabel dan gambar untuk membantu menjelaskan penelitian.
- c) Proses 3: Pengolahan data merupakan proses menjabarkan dan menghubungkan proporsi-proporsi yang muncul dari data diatas dan kemudian menyusunnya kembali sehingga mampu menjelaskan fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menghubungkan data yang telah ada terkait implementasi inovasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi dengan teori yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini.

- d) Proses 4: Penarikan Kesimpulan (verifikasi data) atau pola keteraturan/pola penyimpangan yang terjadi dalam fenomena-fenomena tersebut, membuat prediksi atas kemungkinan perkembangan selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dilaksanakan melalui langkah pertama yaitu melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan reduksi data untuk memilah data yang dikumpulkan. Setelah itu data ditampilkan dan diolah sesuai dengan teori yang digunakan, sehingga akan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Berikut disajikan gambar mengenai alur proses analisis data dalam penelitian ini:



Gambar 1.1 Analisis Model Miles & Huberman

Sumber: Diyati & Muhyadi, 2014

Berdasarkan gambar alur analisis data gambar 1.1, dapat dipahami bahwa proses penelitian ini berlangsung secara berulang dan saling berkaitan antara tahap sebelum pengumpulan data, saat di lapangan, hingga pada tahap akhir analisis.

Proses ini bersifat interaktif dan dinamis, karena peneliti terus meninjau kembali data yang diperoleh agar hasil analisis tetap konsisten dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari berbagai informan, seperti pihak Dinas Pendidikan, operator aplikasi SILAT, dan masyarakat pengguna layanan, dicatat secara rinci dan teliti. Data tersebut kemudian diringkaskan dan dipusatkan pada informasi yang relevan, terutama yang berkaitan dengan tiga elemen utama teori Harvard JFK, yaitu dukungan (support), kapasitas (capacity), dan nilai atau manfaat (value).

Hasil reduksi data ini memberikan gambaran yang lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam menemukan pola keterkaitan antara implementasi inovasi SILAT dan efektivitas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora. Setelah proses reduksi, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun diagram untuk memperjelas hubungan antar temuan di lapangan.

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana setiap temuan yang telah disajikan diverifikasi kembali melalui proses triangulasi sumber dan teknik. Kesimpulan akhir penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang menjelaskan bagaimana dukungan kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan nilai manfaat aplikasi SILAT berkontribusi terhadap keberhasilan inovasi layanan publik dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora.

1.8.8 Kualitas Data

Teknik pemeriksaan kualitas data dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong Lexy (2017:330) triangulasi

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data yang telah diperoleh, dan biasanya memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian implementasi inovasi SILAT dalam pelayanan administrasi pendidikan di Kabupaten Blora bertujuan untuk mengecek keabsahan data sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas yang teruji. Menurut Sugiyono (2010), dalam menguji keabsahan melalui teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut.
- 2) Triangulasi teknik sebagai penguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Dalam penelitian ini menguji validitas data dilaksanakan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini akan mencocokkan data yang sudah diperoleh dari satu narasumber dengan narasumber lainnya dan selanjutnya akan diuraikan untuk dapat ditarik kesimpulan.